

Manifesto

MASA-DEPAN POLITIK KEPULAUAN KITA

Oleh

Dr. TENGKU HASAN MUHAMMAD di TIRO



Manifesto ini kami tudjukan kepada seluruh putera bangsa-bangsa Kepulauan Kita yang senasib dibawah penindasan kolonialisme baru yang berkulit saw oh-matang -- kolonialisme Djawa -- yang telah menggantikan kolonialisme lama yang berkulit putih dan berkulit kuning di Kepulauan Kita, sehabis Perang Dunia ke-II. Manifesto ini menolak pendudukan dan penguasaan Tanah Ibu kami Sumatera, demikian djuga Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Pasundan dan Irian, oleh kaum kolonialis Djawa.

Manifesto ini menundukkan bahwa selama dunia berkembang, dan sedjak ne-nek-mojang kita memulai sedjarah kita dibagian dunia ini, konsepsi politik "Indonesia" itu tidaklah pernah ada, sampai pendjadjah Barat mengadakannya: konsepsi "Indonesia" adalah konsepsi asing, ber-lafaz asing, diadakan untuk kepentingan pendjadjah menjatukan djadjahannya: kesatuan yang dilambangkannya adalah kesatuan tanah djadjahan; tudjuannya yang tertinggi: exploitatie, pemerasan. Bagi kita bangsa Sumatera, bangsa Sulawesi, bangsa Maluku, bangsa Kalimantan, bangsa Sunda, bangsa Bali, dan lain-lain yang mendjadi korban pemerasan itu, tidak ada alasan sedjarah, atau ekonomi, atau politik, atau kebudajaan, atau sosial, untuk menelan konsepsi kolonial ini. Sebelum pendjadjah Belanda datang, sedjak ribuan tahun, kita telah mempunjai negara-negara yang merdeka dan berdaulat di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali dan Pasundan. Tetapi "Indonesia" ? Tidak pernah! Malah karena Belanda tidak dapat menghantjurkan kekuasaan negara-negara kita itulah maka Belanda terpaksa memilih d e s a Jakarta sebagai basis kekuasaan kolonialnya untuk menjerang seluruh Kepulauan Kita, suatu perbuatan yang kini sedang diteruskan pula oleh kolonialis baru. Kita hanya perlu membatja sedjarah kita dengan teliti untuk mengetahui ini!

Manifesto ini bukanlah satu panggilan untuk "memetjah-belah". Djauh dari itu, kita hanya menuntut apa yang menurut hukum, adat, dan sedjarah, adalah mendjadi hak kita: pengembalian hak memerintah diri-sendiri kepada semua bangsa-bangsa Kepulauan Kita; pengembalian kedaulatan atas Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Irian, Bali dan Sunda kepada bangsa-bangsa itu sendiri. Manifesto ini mengadjak bangsa-bangsa Kepulauan Kita untuk menggantikan kolonialisme Djawa-- yang kini sedang menghadapi keruntuhan moral, politik dan ekonomi -- dengan satu bentuk kerdjasama politik yang baru antara kita, dalam sebuah Konfederasi Asia Tenggara (KASIT), dimana Sumatera, Sulawesi, Maluku, Bali, Kalimantan, Pasundan, Irian, dan lain-lain yang ikut serta, merupakan anggota yang sama-sama berdaulat, bukan lagi sebagai djadjahan belaka dari kaum kolonialis Djawa.

Kesatuan "Indonesia" yang dikehendaki oleh kolonialis Djawa adalah kesatuan pasukan-pasukan "romusja" yang tjompang-tjamping dibawah komando Sukarno Sosrodihardjo; persatuan Kepulauan Kita yang dikehendaki oleh MASA - DEPAN POLITIK KEPULAUAN KITA adalah persatuan bangsa-bangsa berdaulat, persatuan dalam kemerdekaan dan kebebasan, kerdjasama antara bangsa-bangsa Kepulauan Kita dalam suasana hormat-menghormati, dan pengakuan terhadap masing-masing sebagai Tuan dirumahnya sendiri.

Dr. Hasan Muhammad di Tiro



INILAH INDONESIA-DJAWA

Apa jang kita persaksikan sekarang ini di Tanah Ibu, kampung-halaman kita, bukanlah suatu keadaan sementara, tetapi suatu keadaan jang tetap dan mungkin kekal. Satu perobahanpun tak akan terdjadi dengan sendirinja dimasa jang akan datang. Duapuluh tahun adalah suatu masa jang sangat lama, sama dengan berlalunya satu keturunan manusia. Dalam masa duapuluh tahun ini beberapa buah keradjaan besar sudah dibagi-bagi dan dibubarkan, lebih enam-puluh buah negara-negara baru sudah dibangun, hampir seluruh bangsa-bangsa jang dahulunya terdjadjah sudah memperoleh kembali kemerdekaan mereka, seluruh ekonomi dan industri benua Eropah dan Djepang sudah selesai dibangun kembali dari runtuh puing Perang Dunia ke II. Apa jang sudah "tertjapai" dan terdjadi di kepulauan kita dalam masa jang selama itu adalah terlalu menjedihkan untuk diperbintjangkan disini.

Tetapi apa jang sudah kita alami selama masa satu keturunan bukanlah lagi suatu keadaan sementara; ini adalah suatu keadaan jang kekal dari Indonesia-Djawa. Inilah rupa dan wajah Indonesia-Djawa jang sebenar-benarnya: dimana rakjat makin sehari makin bertambah lapar; dimana politik keuangan negara terdiri dari pemotongan wang setiap setahun berselang; dimana inflasi merupakan satu sifat jang kekal dari ekonomi jang telah meruntuhkan simpanan, harta benda, kekajaan dan kehormatan rakjat kita; dimana tidak ada lagi kebebasan beragama ketjuali a la Djawa, tidak ada lagi kebebasan berbitjara, tidak ada lagi kebebasan menulis, dan tidak ada lagi kebebasan dari ketakutan dan antjaman; dimana setiap orang terantjam oleh penahanan dan penangkapan jang sewenang-wenang, bahkan oleh pembunuhan jang semena-mena oleh polisi dan tentera; dimana tidak ada lagi keadilan dan hukum; dimana Undang-undang Dasar negara ialah apa jang disebut oleh fuehrer Djawa belaka; dimana rakjat sudah kehilangan hak-hak politik dan hak-hak asasi kemanusiaan mereka; dimana pertumpahan darah terdjadi terus-menerus dengan tidak berhenti-hentinja ketjuali di daerah-daerah bangsa Djawa; dimana semua orang baik-baik jang dahulunya sudah berdjuaug untuk kemerdekaan Indonesia-Djawa berada dan meringkuk dalam pendjara, sedang mereka jang seharusnya dalam pendjara berada diluar membangga-banggakan pakaian seragam djenderal-djenderal dan kedudukan menteri-menteri. Inilah gambaran dan rupa Indonesia-Djawa, "satu negara pentjuri dan perampok jang disalah-perintahi oleh orang-orang setengah gila", sebagai seorang penulis sudah berhasil mensifatkannya dengan tepat sekali.

Inilah gambaran dari Indonesia-Djawa semendjak duapuluh tahun jang silam. Inilah gambaran dari Indonesia-Djawa untuk duapuluh abad jang akan datang, djika kita putera-putera Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Sunda, dan lain-lain, tidak bangun serentak dari tidur kita, dan tegak berdiri merebut kembali kemerdekaan dan kehormatan kita jang selama duapuluh tahun ini sudah di abai-abai dan direndah-rendahkan oleh kaum kolonialis Djawa. Waktunya sudah sampai buat kita untuk menjuruh kaum kolonialis Djawa itu

pullang ke negerinja, untuk mengatakan kepada mereka supaya berhenti mendiktekan kita bagaimana memerintah Tanah Ibu, kampung-halaman kita sendiri, bagaimana mempergunakan wang kekajaan kita sendiri, dan bagaimana mendidik anak-turunan kita sendiri. Kalau kita tidak segera mendapati kembali perasaan harga-diri kita, perasaan pertjaja pada diri kita sendiri dan mengambil kekuasaan atas Tanah Ibu, kampung-halaman, rumah-tangga dan harta-benda kekajaan kita sendiri, maka masa sekarang dan masa depan kita dan keturunan kita akan hilang lenjap untuk selama-lamanja sebagaimana halnya dengan masa silam kita seketurunan ini.

* * *

II

KOLONIALISME BELANDA TIDAK DIHAPUSKAN TETAPI DITERUSKAN DENGAN NAMA BARU

Apa jang sudah terdjadi di kepulauan kita selama duapuluh tahun ini bukanlah penghapusan dari kolonialisme jang telah didirikan oleh Belanda, tetapi adalah penerusan dan pemeliharaannya dalam bentuk dan dasar-dasarnya jang sungguh asli. Jang berobah hanyalah orang-orang jang menduduki istana-istana di Djakarta dan di Bogor. Apa jang sudah terdjadi sebenarnya hanya pertukaran nama-nama pegawai, seorang Belanda jang bernama Hubertus van Mook telah diganti oleh seorang Djawa jang bernama Sukarno Sosrodihardjo. Sedang seluruh sistem pendjadjahan Belanda, dalam bentuk keluasan dan kesatuan daerahnja, dalam bentuk susunan politik dan administrasinja, semuanya pada dasarnya dipelihara bulat-bulat sebagai semula. Pengorbanan terachir, penjerahan bangsa Irian Barat kepada kaum kolonialis Djawa telah dilakukan atas "kekuatan" alasan jang bahwa mereka itupun dahulunya didjadjah oleh Belanda dan karena itu merekapun masuk daftar "hak-milik" dan "harta-benda" Hindia-Belanda jang harus diserahkan kepada keturunan Hindia-Belanda itu, jaitu Indonesia-Djawa. Sudahlah terang-benderang bahwa djika hasil dari penaklukan Belanda diserahkan kepada Djawa, maka akibatnja tidak boleh tidak melainkan pendirian satu imperialisme Djawa diatas tempat jang tadinja diduduki oleh imperialisme Belanda. Karena itu tidaklah mengherankan kalau inilah jang sebenarnya jang sudah terdjadi. Bagaimana maka hal jang sematjam ini telah diterima sebagai satu "pemberian kemerdekaan" dan sebagai satu tindakan penghapusan pendjadjahan di kampung-halaman kita adalah suatu hal jang sungguh mengherankan!

Pada waktu pendjadjahan Inggeris telah diachiri dengan mengembalikan hasil-hasil dari penaklukan Inggeris kepada pemilik-pemilik aslinja: India dikembalikan kepada orang India, Pakistan dikembalikan kepada orang Pakistan, Burma dikembalikan kepada orang Burma, Ceylon kepada orang Ceylon, Ghana kepada orang Ghana, Kenya kepada orang Kenya, Kuwait kepada orang Kuwait, Iraq kepada orang Iraq, Jordan kepada orang Jordania, Mesir kepada orang Mesir, dan demikianlah seterusnya; pada waktu pendjadjahan Perantjis sudah dihapuskan dengan mengembalikan semua hasil dari

penaklukan Perantjís masing-masing kepada penduduk aslinja jang berhak : Syria dikembalikan kepada orang Syria, Lebanon dikembalikan kepada orang Lebanon, Tunisia dikembalikan kepada orang Tunisia, Aldjazair dikembalikan kepada orang Aldjazair, Mauretania dikembalikan kepada orang Mauretania, Madagaskar kepada orang Madagaskar, Congo kepada orang Congo, Vietnam kepada orang Vietnam, Kambodja kepada orang Kambodja, Laos kepada orang Laos, dan demikianlah seterusnya. Tetapi bertentangan sekali dengan aliran zaman ini, dan berlawanan sekali dengan segala hukum keadilan, maka pendjadjahan Belanda di kepulauan kita telah dipelihara bulat-bulat, tanah-tanah jang ditaklukkannja tidaklah dikembalikan kepada bangsa aslinja jang berhak atas tanah-tanah itu jang dahulunya direbut oleh Belanda dari mereka dengan peperangan jang berlumur darah: Sumatera tidaklah dikembalikan kepada orang Sumatera, kalimantan tidaklah dikembalikan kepada orang Kalimantan, Sulawesi tidaklah dikembalikan kepada orang Sulawesi, Maluku tidaklah dikembalikan kepada orang Maluku, Bali tidaklah dikembalikan kepada orang Bali, Pasundan tidaklah dikembalikan kepada orang Sunda, tetapi semuanya telah diserahkan bulat-bulat kepada kaum kolonialis Djawa, dengan tidak ada pertanjaan dan pemilihan. Semuanya dengan serta-merta telah diserahkan kepada Djawa, se-akan-akan kita semua adalah "hak-milik" dan "barta-benda" dari Hindia-Belanda jang dapat diwariskan demikian sadja kepada keturunannja, yakni Indonesia-Djawa. Oleh karena itu, tindakan pemerdekaan (decolonization) sebagaimana jang dikehendaki oleh Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa belum lagi didjalankan di kepulauan kita sebagaimana sudah didjalankan di Indotjina, Asia dan Afrika.

Oleh karena republik Indonesia-Djawa jang sekarang dalam teori-nja dan dalam kenjataanja adalah landjutan dari pendjadjahan Belanda dan waris dari pada segala hasil penaklukan jang tidak sah dan perampokan belaka dari Hindia-Belanda, maka masalah ke-legal-an kekuasaan dan pendiriannja adalah masalah jang sangat penting sekali, karena republik Indonesia-Djawa jang sekarang ternjata suatu negara jang tidak sah dan suatu negara jang tidak mempunjai dasar hukum. Walaupun republik Indonesia-Djawa sekarang mendiduki Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, Bali, Sunda dan lain-lain, kenjataan pendudukan sadja tidaklah melegalkan apa-apa, dan tidaklah memberi hak-hukum kepada kaum kolonialis Djawa untuk menguasai negara-negara besar tersebut. Hak hukum atas sesuatu tanah tidaklah berasal dari pendudukan dan tidak pula berdasarkan pada pendudukan itu, tetapi berdasarkan pada bagaimana hal-ihwal dan asal usul terdjadinja pendudukan itu dimasa jang sudah dan bagaimana hal itu dipertahankan sekarang. Untuk membuktikan keadilan sesuatu tuntutan terhadap sesuatu tanah atau daerah (territory) kita harus memeriksa lebih dahulu tentang tata-tertib (procedure) jang dengan melaluinja tanah itu sudah diambil atau diperoleh. Dan achirnja dengan memastikan kedudukan dari tata-tertib ini dalam Hukum Internasional.

Apakah tata-tertib jang dipakai oleh orang Belanda dalam mengambil Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain-lain, dan dalam membuat negeri-negeri itu mendjadi bagian dari Hindia - Belanda ?

Rasanja tidaklah perlu kita paparkan lagi disini tentang sedjarah peperangan kedjam yang telah dilakukan oleh Belanda untuk menaklukkan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain-lain, dalam usahanya untuk merebut dan menempatkan negeri-negeri itu dibawah pendjadjahan Hindia-Belanda, yang kemudiannya oleh Belanda sendiri ditukar namanya menjadi "Indonesia". Ratusan ribu nenek moyang kita telah mengorbankan jiwa raga mereka dengan kepahlawanan yang tak ada taranja untuk mempertahankan Tanah Ibu, kampung-halaman kita dari aggressi Belanda dan kaki-tangan-nja serdadu-serdadu sewaan. Ini adalah sebagian dari sedjarah kita yang tak bisa di obah-obah lagi. Inilah tata-tertib dan tjara yang dipakai oleh Belanda dalam mengambil Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Balidan lain-lain, dan dalam menempatkan negeri-negeri ini dibawah kekuasaan pendjadjahan mereka yang berpusat di Djawa. Inilah "tata-tertib" yang dengan melaluinja kedaulatan Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain, telah dihancurkan. Ini adalah terang-terangan suatu perbuatan yang tidak sah, suatu tindakan aggressi dan perampokan belaka. Tindakan-tindakan sematjam ini tidak pernah dapat dibenarkan, baik menurut Hukum Nasional, maupun menurut Hukum Internasional. Djika dasar Hindia-Belanda adalah salah, maka Indonesia-Djawa yang seratus persen didasarkan atas Hindia-Belanda, baik mengenai daerahnja, maupun mengenai hak hukum-nja, tidaklah dapat menjadi benar. Dasar Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang mengatakan bahwa ex injuria jus non oritur, bahwa "Hukum (hak) tidak dapat berasal dari perbuatan yang tidak berdasar hukum" atau "Kebenaran tidak datang dari kesalahan (kebathilan)", adalah masih menjadi dasar hukum dari dunia beradab.

Kesalahan dan ketidak-adilan yang bersedjarah ini hanya dapat diperbaiki dan dipulihkan dengan mengembalikan kedaulatan atas Sumatera kepada bangsa Sumatera, kedaulatan atas Kalimantan kepada bangsa Kalimantan, kedaulatan atas Sulawesi kepada bangsa Sulawesi, atas Maluku kepada bangsa Maluku, atas Bali kepada bangsa Bali, atas Pasundan kepada bangsa Sunda, dan lain sebagainya. Kesalahan dan ketidak-adilan ini sekali-kali tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipulihkan dengan memelihara kesatuan daerah Hindia-Belanda, walaupun dengan memakai merek baru sebagai "Indonesia". Perbuatan yang sedemikian menjolok mata ini takkan diterima orang di bagian dunia yang manapun juga. Tak ada bangsa yang masih berkehormatan akan menerima penipuan-penipuan sematjam ini. Djika hal yang sematjam ini berlaku dibagian dunia yang lain, maka lebih 60 buah negara-negara baru yang telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa takkan pernah memperoleh kembali kemerdekaan mereka. Djika demikianlah kedudukan perkara dan penyelesaianja, maka Kamboja, Vietnam dan Laos takkan pernah mendapat kembali kemerdekaan mereka dari Perantjis, karena kedaulatan atas negeri-negeri mereka dengan mudah dapat diserahkan kepada satu "Republik Indotjina" yang dibuat-buat sadja; djika demikianlah gerakan duduk perkaranja, maka Pakistan, Burma, dan Ceylon takkan pernah mendapat kemerdekaan mereka kembali dari Inggris karena seluruh daerah djadjahan Inggris di benua Asia dengan mudah dapat dimasukkan dalam satu negara kesatuan India; djika demikian gerakan soalnja, maka Tunisia,

Maroko, Aldjazair, dan Mauretania takkan pernah ada lagi, karena semua mereka dapat diserahkan pada satu negara kesatuan Afrika Perantjis dengan sesuatu nama samaran jang lain. Djika demikianlah aturannya, maka Kenya, Tanganyika, Zanzibar, Ghana, Ivory Coast, Sierra Leone, dan lain - lain, takkan pernah memperoleh kembali kemerdekaan mereka, karena semuanya dapat diserahkan kepada sesuatu negara kesatuan Afrika Inggeris dengan memakai sesuatu nama samaran jang lain. Demikian juga Madagaskar, Congo, Mali, Togo, dan lain-lain, takkan pernah dapat mentjapai kemerdekaan mereka kembali karena semua mereka dapat dimasukkan dalam sesuatu Afrika Perantjis dengan sesuatu nama lain jang dibuat-buat pula. Tetapi inilah bentuk dan isi dari "kemerdekaan" jang telah diberikan kepada bangsa-bangsa kepulauan kita.

Teranglah sudah, djika kesatuan daerah kekuasaan (territorial integrity) dari Hindia-Belanda tetap dipertahankan dan tetap dipelihara, maka tidak mungkin dan mustahil Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain-lain, dapat merdeka, karena pemeliharaan kesatuan daerah kekuasaan Hindia-Belanda dengan nama baru apapun, berarti perkosaan jang terus-menerus atas kedaulatan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Sunda, dan lain-lain. Selama kedaulatan itu belum dikembalikan kepada kita, maka kemerdekaan kitapun belumlah dikembalikan. Ketika Belanda pergi dari kepulauan kita, kedaulatan jang menjadi hak kita itu tidaklah dikembalikan kepada kita. Sebaliknya, kedaulatan kita itu sudah diserahkan bulat-bulat kepada pemerintah Djawa di Djakarta. Pada hal kita mengetahui bahwa keputusan pemerintah kolonialis Belanda untuk memusatkan segala kekuasaan administrasinya di Djakarta, dan menjadikan Djakarta sebagai ibu-kota djadjahan mereka, adalah berdasarkan pada pertimbangan kepentingan kaum kolonialis Belanda sendiri untuk memudahkan pemerasan djadjahan mereka, dan bukan karena pertimbangan-pertimbangan untuk kepentingan kita bangsa-bangsa kepulauan ini. Djuga pembikinan Djakarta sebagai ibukota Hindia-Belanda itu dipaksakan oleh keadaan mereka sendiri waktu itu, dimana Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan lain-lain, masih dalam keadaan merdeka dan berdaulat, dan belum lagi dapat dikalahkan oleh Belanda. Sekarang kaum kolonialis Djawa berbitjara se-akan-akan Djakarta telah didjadikan oleh Tuhan sebagai ibukota bagi kita semua. Pembentukan Djakarta sebagai ibukota Indonesia-Djawa adalah seratus persen bikinan kolonialis Belanda dan dipaksakan dengan kekerasan senjata semata-mata. Tak ada alasan sedjarah, alasan hukum, alasan politik, ekonomi atau administrasi mengapa kita bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain-lain dari luar Djawa harus menerima diktat dari mereka jang berada di Djakarta jang hendak meneruskan pendjadjahan atas kita di abad ke duapuluh ini !

Apa jang sudah terdjadi di Tanah Ibu, kampung-balaman kita, ditahun 1945 dan 1950 adalah suatu akte pemindahan kekuasaan dari satu kekuasaan imperialis kepada satu kekuasaan imperialis jang lain, dari imperialis lama kepada imperialis baru, jaitu pemindahan kekuasaan atas seluruh kepulauan kita dari imperialisme Belanda kepada imperialisme Djawa, dengan kesatuan daerah kekuasaan negara pendjadjahan Hindia-Belanda dipelihara

sebulat-bulatnja. Tetapi pemeliharaan bulat-bulat dari daerah kekuasaan sesuatu negara berarti dan sama dengan pemeliharaan dari negara itu. Sesuatu negara kolonial tidaklah dibubarkan dan ditiadakan djika daerah kekuasaannja dipelihara dan dipertahankan bulat-bulat. Tindakan penghapusan kolonialisme hanya dapat dilakukan dengan mengembalikan hak kedaulatan atas tiap-tiap daerah kepada bangsa aslinja yang berhak, dan ini berarti kembali kepada status quo ante, artinja, kembali kepada keadaan sebelum pendjadjahan atau kolonialisme itu didirikan. Tindakan penghapusan kolonialisme ini belumlah lagi didjalankan di kepulauan kita. Tindakan penghapusan pendjadjahan ini tidaklah dapat dilakukan dengan menukar nama "Hindia-Belanda" dari bahasa Belanda ke bahasa Junani, yakni hanya dengan menukar nama "Nederlandsch Indie" dengan "Indonesia". Penghapusan sesuatu negara djadjahan tidaklah dapat dilakukan dengan menukar nama nja, tetapi harus dilakukan dengan memulangkan kembali daerah kekuasaan nja kepada bangsa asli yang berhak menerimanja, dari nenek mojang siapa daerah-daerah itu sudah direbut oleh sipendjadjah. Djadi teranglah sudah bahwa Sumatera haruslah dikembalikan kepada bangsa Sumatera, Kalimantan kepada bangsa Kalimantan, Sulawesi kepada bangsa Sulawesi, Maluku kepada bangsa Maluku, Bali kepada bangsa Bali, Irian kepada bangsa Irian, Sunda kepada bangsa Sunda, dan demikianlah seterusnya. Hanya sesudah itu barulah pendjadjahan sudah dihapuskan dari bumi kepulauan kita.

Satu djalan legal lagi dalam membubarkan sesuatu kolonialisme atau pendjadjahan ialah dengan pemungutan suara bebas dari bangsa-bangsa yang bersangkutan, untuk memilih sesuatu bentuk pemerintahan baru yang mereka ingini sendiri. Sudah sama-samalah kita ketahui bahwa baik djalan yang pertama, maupun djalan yang kedua ini, tidaklah pernah didjalankan di kepulauan kita. Apa yang sudah terdjadi ialah bahwa kita semua, dengan serta merta, telah diserahkan kebawah kekuasaan pemerintah kolonial Djawa di Djakarta itu.

Kaum kolonialis Djawa tidaklah mempunyai suatu hak apapun djuga, baik hak sedjarah, maupun hak politik, apalagi hak moral, untuk mendjadjah bangsa-bangsa lain di kepulauan kita. Segala matjam pendjadjahan dalam bentuk dan warna apapun djuga, baik putih, kuning, atau sawoh-matang tidaklah dapat diterima oleh bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Sunda, dan lain-lain. Kita tidak menentang untuk bekerdja sama dengan segala bangsa, termasuk bangsa Djawa, tetapi kerdjasama ini haruslah berdasarkan pada sama-sama berdaulat (sovereign equals). Zaman pendjadjahan, termasuk pendjadjahan Djawa, sudah berachir di kepulauan kita.

Dalam pada itu patutlah kita kemukakan dari semula bahwa kolonialisme Djawa, sebagaimana semua kolonialisme yang lain, bukanlah kolonialisme yang disokong oleh seluruh rakjatnja. Kolonialisme Djawa disokong oleh satu golongan dari bangsa Djawa; penjokong-penjokong ini terdiri dari golongan-golongan yang menerima keuntungan langsung atau tidak langsung dari pendjadjahan Djawa atas seluruh kepulauan kita. Mereka ini terdiri dari puluhan ribu orang-orang Djawa yang mempunyai kedudukan sebagai perwira dan peradjudit dalam angkatan darat, laut, dan udara; kepala-kepala djawatan

dan pegawai-pegawai; kepala-kepala perusahaan negara dan diplomat-diplomat Djawa; kepala-kepala dan anggota-anggota partai, termasuk serikat-serikat sekerdja, yang kesemuanya memegang monopoli dalam segala lapangan pekerdjaan yang terbaik di kepulauan kita.

Tetapi sebenarnya memang tidak ada satu kolonialisme-pun dalam sedjarah yang disokong oleh seluruh rakyatnja. Walaupun kolonialisme Inggeris, Belanda, Perantjis, Spanjol, dan lain-lain, tidaklah pernah mendapat sokongan lebih dari segolongan yang ketjil sekali dari bangsa-bangsa itu. Bahkan orang-orang yang paling anti-kolonialisme sebenarnya terdapat di Inggeris, seperti Jeremy Bentham, John Hobson, dan lain-lain. Tetapi walaupun demikian tidaklah dapat disangkal tentang adanjakolonialisme Inggeris, tentang adanja kolonialisme Belanda (walaupun Multatuli !), dan demikianlah seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita menjebut kolonialisme Djawa, maka kita tidaklah bermaksud untuk mengatakan bahwa semua orang Djawa itu kolonialis, walaupun sampai hari ini, duapuluh tahun sesudah kolonialisme Djawa didirikan, kita masih belum mendengar satu orang Djawapun yang mempunyai kedjudjuran untuk mengakui dan mempunyai keberanian untuk mengetjam kolonialisme Djawa itu sebagaimana John Hobson telah mengetjam kolonialisme Inggeris, dan sebagaimana Multatuli telah mengetjam kolonialisme Belanda!

* * *

III

"INDONESIA" ARTINJA "KEPULAUAN KELING" BUKAN NAMA BANGSA KITA

Propagandis-propagandis Djawa, didalam dan diluar negeri, sudah berusaha untuk mengabui mata kita dan mata dunia guna untuk menutup-nutup kolonialisme Djawa yang sedang mereka lakukan di kepulauan kita, dengan mengemukakan kepada orang-orang yang tidak mengetahui sedjarah kita bahwa nama "Indonesia" itu se-akan-akan menundjukkan nama sesuatu bangsa yang sesungguhnya, yang orangnja dengan tegas-tegas dapat ditundjukkan dan dibuktikan. "Indonesia" adalah kata-kata bahasa Junani yang berarti "kepulauan Keling", dipakai pertama kali oleh seorang wartawan Austria yang bernama Bastiaan, kira-kira 50 tahun yang silam, karena ia tidak mengetahui sesuatu nama collective yang lain untuk menjebut seluruh kepulauan kita. Nama ini paling banjak dapat diterima sebagai suatu geographic expression (hanya sekedar sebutan nama dipeta bumi) yang sama halnya dengan nama-nama dan sebutan-sebutan "Indotjina", "Afrika", "Eropah", atau "Amerika". Nama-nama ini tidaklah menundjukkan sesuatu bangsa yang tertentu, tetapi hanya menundjukkan sesuatu tempat di muka bumi. Nama "kepulauan Keling" atau dalam bahasa Junani "Indonesia" yang sudah diberikan orang kepada bagian

dunia kita ini, tidaklah mempunyai sangkut-paut apa-apa dengan sedjarah kita. Nama ini tidaklah mempunyai sedjarah dan tidak mempunyai masa silam; dan orang Djawa golongan kolonialis sudah merusakkan masa sekarangnja: karena itu nama ini tidak mempunyai masa depannja lagi selain dari pada sebagai to-peng belaka bagi kolonialisme Djawa.

Sesuatu dakwaan bahwa nama "kepulauan Keling" atau dalam bahasa asing "Indonesia" itu bukan hanya nama sebutan daerah peta bumi belaka, dakwaan jang serupa itu tidak boleh tidak akan langsung bertentangan dengan kenyataan kenyataan ilmu sedjarah, ilmu keturunan manusia (anthropology) , ilmu bangsa-bangsa (ethnology) , ilmu masjarakat (sociology) , ilmu djiwa masjarakat (social psychology) , dan kebudayaan (cultures) dari pada bangsa-bangsa jang mendjadi penduduk bagian dunia kita jang amat luas ini. Mungkin bangsa-bangsa penduduk bagian dunia kita ini pada suatu masa akan mendjadi satu bangsa, -- dan ini bergantung pada kemedjuaan kerdjasama jang adil antara kita semua, -- tetapi masa itu barangkali baru akan datang bila dalam sedjarah perkembangan kemanusiaan, orang Perantjis, orang Inggeris, orang Spanyol, Belanda, Italia, Djerman dan Rusia semuanya akan mendjadi satu bangsa "Eropah"; orang-orang Kanada, Kuba, Mexico, Brazil, Panama, Argentina, dan lain-lain, semuanya akan mendjadi satu bangsa "Amerika"; orang-orang Kambodja, Laos dan Vietnam semuanya akan mendjadi satu bangsa "Indotjina"; tetapi sebelum hari itu datang, orang tidak dapat meminta kita dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain-lain untuk mendjadi bangsa "kepulauan Keling" dengan begitu sadja, apalagi bila gelaran "megah" itu sebenarnja dipakai sebagai kedok dan topeng belaka untuk merebut kekajaan alam dan merampas tanah pusaka kita.

Djuga saranan-saranan sudah dikemukakan bahwa bangsa-bangsa penduduk kepulauan kita ini sudah dibuat mendjadi satu bangsa jang tunggal, jang tidak dapat di beda-bedakan dan dipisah-pisahkan lagi, oleh "persamaan nasib" (community of fate) yakni oleh pendjadjahan Belanda selama "350 tahun" itu. Tak ada suatu hal jang lebih djauh dari keadaan jang sebenarnja. Pertama sekali, tak ada satu bangsapun diseluruh kepulauan kita jang didjadjah oleh Belanda selama 350 tahun selain bangsa Djawa sendiri. Tak ada satu bangsapun jang lain dibagian dunia kita jang luas ini jang mengalami sedjarah jang begitu menjedihkan dan menjesalkan ini. Sedjarah mereka masing-masing telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa jang lain di kepulauan kita sudah berperang mati-matian mempertahankan kedaulatan mereka dari serangan Belanda, dan pada umumnja mereka tidak djatuh kebawah pendjadjahan Belanda lebih dari rata-rata 50 tahun. Sedang bangsa Atjeh tidak hilang kemerdekaannja kepada Belanda lebih dari 29 tahun (dari berachirnja Perang Belanda-Atjeh ditahun 1913 sampai kedatangan Djepang di tahun 1942) , itupun sesudah peperangan jang terhebat dibagian dunia kita ini, jang dimulai di tahun 1873 dan baru berachir ditahun 1913. Dalam perang 40 tahun terus-menerus ini bangsa Atjeh telah memperlihatkan kepahlawanan jang dapat dibandingkan dengan kepahlawanan bangsa manapun dalam sedjarah dunia. Demikian djuga halnja dengan bangsa Bugis, Bali, dan lain-lain. Oleh karena itu tidaklah mungkin bagi kita putera-putera Sumatera, Sulawesi, Bali dan lain-lain, untuk menerima "thesis Djawa" tentang

"350 tahun pendjadjahan" itu, selama kita masih mengenal dan mengetahui sedjarah kita, selama kita tidak dapat melupakan tindakan-tindakan kepahlawanan nenek-mojang kita. Sebenarnja kita akan harus memalsukan sedjarah kita, kita akan harus mengchianati ingatan dan kenang-kenangan kepada djasa kepahlawanan nenek-mojang kita, sebelum kita dapat menerima "thesis Djawa" jang memalukan ini sebagai sedjarah kita. Sudah terang tak ada manusia terpeladjar dan bangsa-bangsa jang sudah beradab dapat diharapkan untuk mengikuti kehendak kaum kolonialis Djawa ini.

Semua ini menundjukkan pula bahwa kita sebenarnja tidaklah mempunyai hubungan apa-apa dengan orang Djawa dalam sedjarah kita selain dari pada kadang-kadang kita menghadapi mereka sebagai sipendjadjah atau sebagai alat sipendjadjah jang lain. Kita tidaklah mempunyai persamaan sedjarah politik dengan mereka, kita tidaklah mempunyai satu sedjarah kebangsaan jang sama dengan mereka, dan karena itu kita tidak mempunyai persamaan ingatan dan kenang-kenangan dengan mereka. Kita tidaklah mempunyai persamaan rasa-bangga dan rasa-sedih atau rasa-dihinakan jang berhubungan dengan kedjadian-kedjadian jang sama dalam sedjarah kita dimasa jang silam. Sebenarnja kita sekarang malah sudah kebiasaan selama 20 tahun jang achir-achir ini dimana pahlawan-pahlawan kita di Sumatera, Sulawesi dan Maluku serta Kalimantan disebut "pengchianat" oleh orang Djawa. Sungguh kita mempunyai penilaian jang tidak sama dengan kaum kolonialis Djawa mengenai masa silam kita, mengenai masa sekarang kita, dan mengenai masa depan kita.

Jang kedua mengenai dongeng "persamaan nasib". Sudahlah mendjadi pengetahuan umum dalam sedjarah kita bahwa pendjadjahan Belanda telah berhasil dipaksakan atas Tanah Ibu, kampung-halaman kita dengan mempergunakan serdadu-serdadu sewaan Djawa setjara besar-besaran. Karena itu adalah suatu hal jang sewadjarnja untuk kita bertanja: apakah mungkin terdapat suatu persamaan nasib antara golongan serdadu-serdadu sewaan dengan bangsa-bangsa jang diperangi oleh mereka, dibagian dunia jang manapun djuga? Disamping itu patutlah diketahui dan ditjamkan bahwa pendjadjahan tidaklah pernah menjatukan sesuatu bangsa di zaman apapun, dan dimanapun djuga. Orang Polandia, orang Tjek, orang Slevak, orang Hongaria, orang Austria, orang Yugoslavia, tidaklah pernah mendjadi satu dan tidaklah pernah melupakan diri mereka masing-masing walaupun mereka itu semuanya berabad-abad lamanja mengalami "persamaan nasib" dibawah penindasan radja-radja Austria-Hongaria. Sebaliknya "persamaan nasib" ini telah membuat mereka itu lebih bermusuhan dengan satu sama lain, karena radja-radja Austria-Hongaria memperalat satu golongan untuk menindas golongan jang lain. Demikian djuga orang Kambodja, orang Laos dan orang Vietnam tetap setia kepada bangsa mereka masing-masing walaupun mereka itu mengalami "persamaan nasib" dibawah pendjadjahan Ferantjis. Mereka tidaklah mendjadi bangsa "Indotjina" oleh karena "persamaan nasib" itu. Walaupun demikian masih ada orang-orang jang mentjoba-tjoba mengatakan bahwa kita orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan, orang Maluku, dan lain-lain, karena "persamaan nasib" dibawah Belanda, maka kita semua telah berubah sifat, telah mendjadi satu bangsa "kepulauan Keling".

Orang India, orang Pakistan, orang Ceylon, dan orang Burma tidaklah pernah melupakan dan melepaskan kebangsaan aslinja masing-masing, walau - pun mereka itu mengalami "persamaan nasib" dibawah pendjadjahan Inggris. Kenyataan ini dapat kita kadji lebih landjut sampai meliputi seluruh benua Afrika, Latin Amerika, dan lain-lain, dimana "persamaan nasib" jang dipaksakan oleh pendjadjahan Perantjis, Inggeris, Portugis dan Spanjol tidaklah pernah menjatukan siapapun dan tidaklah pernah mengubah sesuatu bangsa menjadi sesuatu bangsa jang lain. Apa jang disebut "persamaan nasib" dibawah pendjadjahan asing itu telah semakin lebih memetjah-belahkan bangsa-bangsa itu dari pada menjatukannya. Tetapi semua omong-kosong ini telah dipropagandakan seakan-akan merupakan "rukun iman" oleh kaum kolonialis Djawa untuk mengabui mata kita dan membuat kita menerima perasaan mereka. Kaum kolonialis Djawa menginginkan kesatuan seluruh kepulauan kita, tetapi kesatuan jang mereka inginkan itu bukanlah untuk kebebasan kita semua, tetapi kesatuan seluruh kepulauan kita sebagai djadjahan mereka, kesatuan "romusha" dibawah gembalaan mereka, supaya dapat diperalat dengan lebih mudah dan teratur untuk dipekerdjakan dan diperas guna kepentingan kolonialisme Djawa sendiri.

* * *

IV

KOLONIALISME DJAWA TELAH MENGGANTIKAN KOLONIALISME BELANDA

Orang-orang Djawa jang dahulunya paling tertindas dan melarat kini sudah menukar status dan kedudukan mereka menjadi golongan jang memerintah atas seluruh kepulauan kita, suatu kedudukan jang mereka pusakai dari Belanda 20 tahun jang silam. Mereka sekarang memegang monopoli atas segala pekerjaan jang terpenting dan terbaik, serta memegang kendali kekuasaan dalam pemerintahan negara Indonesia-Djawa. Ambillah sesuatu daftar dari nama wakil-wakil Indonesia-Djawa di negara manapun diseluruh dunia, atau daftar nama-nama dari sesuatu kementerian penting, terutama dalam lapangan ketenteraan dan kepolisian. Djika saudara mengenal nama-nama Djawa, maka daftar-daftar itu akan melompat hidup dihadapan mata saudara (demikianlah ibaratnja), untuk menerangkan pada saudara apa jang di maksudkan dengan kolonialisme Djawa, kalau saudara sendiri belum djuga menjadarinja. Merek dan nama pemerintah ini mungkin "Indonesia", tetapi orang-orang jang memegang kekuasaan adalah njata-njata orang Djawa. Merek diluar kaleng pura-pura menyatakan kemerdekaan, tetapi isi jang sesungguhnya didalam adalah kolonialisme, pendjadjahan: penguasaan oleh satu bangsa atas bangsa-bangsa jang lain, dan pemerasan sesuatu bangsa untuk kepentingan sesuatu bangsa jang lain.

Kaum kolonialis Djawa sudah membuat diri mereka, diatas persada Tanah Ibu kita sendiri, sebagai golongan atas, golongan yang memerintah dalam masyarakat Indonesia-Djawa, golongan yang kedudukan dan jabatannya lebih terjamin. Sedang golongan-golongan yang bukan Djawa makin sehari makin tersingkir jauh dari segala lapangan yang turut menentukan haluan politik negara. Kedjauhan dan perpisahan antara kelas kolonialis Djawa dengan bangsa-bangsa yang didjadjah mereka di daerah-daerah yang disebut mereka sebagai "tanah seberang" semakin bertambah lagi dengan adanya perbedaan-perbedaan bangsa, perbedaan bahasa dan perbedaan budaya antara rakyat "tanah seberang" itu dengan kaum kolonialis Djawa. Ditempat-tempat yang terbaik di kampung-halaman kita, dimana dahulunya terdengar bahasa Belanda, kini telah digantikan oleh bahasa Djawa -- satu bahasa yang asing dari famili bahasa-bahasa Melaju. Sedang pemuda-pemuda Djawa disiapkan untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dan perusahaan-perusahaan (karena di Indonesia-Djawa segala-galanya dibawah kekuasaan pemerintah, yakni pemerintah Djawa!), orang-orang dan pemuda-pemuda yang bukan-Djawa dari sehari kesehari semakin menjadi sipemikul air dan sipemotong kaju bagi "bangsa tuan-tuan" yang baru muntjul itu.

Tetapi setiap langkah yang diambil oleh kaum kolonialis Djawa untuk mendjamin kekalnya kedudukan dan status baru mereka harus dibayar dengan harga yang semakin bertambah mahal dan dengan bahaja yang semakin bertambah besar. Perkembangan ini sudah memutuskan hubungan moral dan politik antara kaum kolonialis Djawa itu dengan bangsa-bangsa yang telah ditipu menjadi anak djadjahan mereka di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Irian Barat, dan lain-lain. Kenyataan bahwa kesemua "anak seberang" itu mempunyai sedjarah yang berbeda, bahasa yang berlainan, tradisi yang tidak sama, kebudayaan yang lain dan malah nama-nama yang sangat berbeda dari orang Djawa, semua ini semakin memperdjauh hubungan lahir dan hubungan batin antara mereka dengan kaum kolonialis Djawa itu. Perkembangan ini sudah membuat kaum kolonialis Djawa menjadi tudjuan dan sasaran yang tidak dapat dielakkan dari proses perkembangan politik dan masyarakat yang berupa perlawanan dan pemberontakan yang tidak berkesudahan, yang sudah terdjadi terus-menerus mulai dari Sumatera sampai ke Maluku. Djalan menuju imperialisme dan kolonialisme Djawa yang telah diambil oleh pemimpin-pemimpin politik Djawa dengan maksud untuk memperkuat kedudukan bangsa mereka dengan tidak mengindahkan hak-hak bangsa-bangsa lain, telah membawa bangsa Djawa bukan kepada kedudukan yang lebih selamat, tetapi kepada kedudukan yang sebenarnya lebih berbahaja dan lebih banyak mengandung anasir-anasir keruntuban, karena mereka tidak boleh tidak, akhirnya akan harus menghadapi perlawanan yang serentak dari bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Bali, Sunda, Kalimantan, dan lain-lain.

Sebagaimana kolonialisme yang lain-lain, kolonialisme Djawa juga mempunyai kaki-tangan dan collaborator-nja. Tetapi collaborator ini djumlahnya ketjil sekali dibandingkan dengan kita bangsa-bangsa "seberang lautan" yang berdjumlah puluhan djuta itu. Para collaborator itu bekerdja sebagai buruh-nja Sukarno Sosrodihardjo, diterima atau dipetjat menurut kehendak dan sesuka hatinya. Kaum kolonialis Djawa pada umumnya mempergunakan mereka

ini sebagai alat propaganda keluar dan kedalam negeri untuk menimbulkan kesan umum seakan-akan kita bangsa-bangsa "seberang lautan" juga "diwakili" dalam pemerintahan kolonialis Jawa.

Alat yang terpenting dari pendjadjahan Jawa ialah negara kesatuan yang mereka paksakan atas seluruh kepulauan kita. Sebenarnya inilah langkah pertama yang diambil oleh kaum kolonialis Jawa untuk mendirikan pendjadjahan mereka dibagian dunia kita ini. Satu negara kesatuan, dengan segala-galanya dikendalikan dari Jawa telah dipaksakan atas kita dengan tidak ada pertanjaan, penerangan, permusjawaratan, apalagi pemilihan. Suatu birokrasi pusat, dengan dibantu oleh polisi (rahsia dan terbuka) yang dikendalikan dari Jawa pula, ditambah dengan tentera, angkatan laut dan udara yang hampir kesemuanya terdiri dari orang-orang Jawa, telah melahirkan pendjadjahan Jawa kealam kenjataan dengan seterang-terangnya.

Alat yang lain dari kolonialisme Jawa ialah ketiga-tiga partai politik besar yang dikendalikan oleh orang Jawa, yaitu PKI (Partai Komunis Indonesia), FNI (Partai Nasionalis Indonesia), dan NU (Nahdatul Ulama). Partai politik yang lain yang tidak dibawah pengaruh orang Jawa, seperti Masjumi (Madjlis Sjura Muslimy Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) telah dilarang dan dibubarkan oleh kaum kolonialis Jawa karena partai-partai ini menghalang-halangi politik mereka.

Tetapi mengetahui nama-nama dari partai-partai ini sadja tidaklah cukup. Kita harus mengetahui pula golongan-golongan bangsa yang menjadi anggotanya dalam bentuk darah-daging mereka. Dalam hubungan ini, pembubaran dan pelarangan partai Masjumi adalah sangat penting karena hal ini menjingkap tabir politik kaum kolonialis Jawa untuk kesekian kalinya. Sebagaimana umum diketahui sebagian yang terbesar sekali dari anggota-anggota Masjumi terdiri dari bangsa Sumatera, bangsa Sulawesi, bangsa Kalimantan, bangsa Maluku, bangsa Sunda, dan lain-lain, tegasnya bukan bangsa Jawa. Hal ini telah dibuktikan dengan setegas-tegasnya oleh kemenangan Masjumi dalam pemilihan umum yang silam, dimana Masjumi selalu mendapat kemenangan diluar pulau Jawa. Oleh karena anggotanya terdiri dari bangsa-bangsa "seberang" maka Masjumi adalah satu partai yang mau tidak mau harus membela kepentingan bangsa-bangsa "seberang", tegasnya kepentingan bangsa-bangsa yang bukan Jawa. Inilah sebab politik yang sebenarnya maka Sukarno Sosrodihardjo, dengan disokong oleh golongan kolonialis Jawa yang lain-lain, telah melarang hidupnya Masjumi.

Walaupun partai-partai PKI, FNI, dan NU tiada berhenti-hentinya menjatakan diri mereka sebagai partai-partai "Indonesia", ketiga-tiga partai itu, dalam kenjataan, didalam-dagingnya, adalah partai-partai bangsa Jawa belaka. Hasil pemilihan umum tahun 1955 umpamanya, menunjukkan dgn angka-angka yang tak dapat disalah-pahami lagi dimana kekuatan dan siapa anggota-anggota partai PKI yang sebenarnya. Dalam pemilihan umum tahun itu PKI hanya mendapat beberapa ratus ribu suara di luar pulau Jawa, itupun berasal dari suara-suara yang diberikan oleh kaum pengungsi Jawa yang terdapat di daerah-daerah itu yang kebanyakan dari mereka terdiri dari pengikut-pengikut PKI. Tetapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur PKI mendapat lebih dari empat-setengah djuta suara.

Pemilihan umum tahun 1955 itu menundukkan angka-angka suara bagi PKI sebagai berikut:

Provinsi:	Suara PKI:
Djakarta	96,363
Sumatera Selatan	176,900
Sumatera Tengah	90,513
Sumatera Utara dan Timur	258,875
Kalimantan Barat	8,526
Kalimantan Timur	8,209
Kalimantan Selatan	17,210
Sulawesi Utara dan Tengah	33,204
Sulawesi Selatan	17,831
Nusa Tenggara	71,075
Maluku	4,792
Djawa Barat	755,634
<u>Djawa Tengah</u>	<u>2,326,108</u>
<u>Djawa Timur</u>	<u>2,299,602</u>

Hasil pemilihan umum pada bulan Agustus tahun 1957 (jang terakhir dilakukan) menundukkan pula perbandingan suara antara PKI, PNI, NU dan Masjumi dalam tiga provinsi pulau Djawa, termasuk Djakarta, sebagai berikut:

Nama Partai:	Djakarta:	Djawa Barat:	Djawa Tengah:	Djawa Timur:
PKI	137,305	1,087,269	<u>2,706,893</u>	<u>2,704,523</u>
PNI	124,955	1,055,801	<u>2,235,714</u>	<u>1,899,782</u>
NU	104,892	597,356	<u>1,771,556</u>	<u>2,999,785</u>
MASJUMI	153,709	1,841,030	714,722	977,443

Sebagaimana dengan mudah dapat dipersaksikan, djumlah suara jang diberikan kepada ketiga-tiga partai jang menjokong kolonialisme Djawa, jaitu PKI, PNI dan NU datangnya dari Djawa Tengah dan Djawa Timur, jaitu tanah air bangsa Djawa sendiri. Suara untuk ketiga partai Djawa ini jang diperdapat di Djawa Barat datangnya dari daerah-daerah perbatasan dengan Djawa Tengah jang diduduki oleh bangsa Djawa. Hasil pemilihan ini menguatkan lagi kenyataan bahwa PKI, PNI, dan NU walaupun mereka memakai nama-nama jang berlainan bahkan bertentangan, mereka itu pada hakikatnya adalah partai-partai orang Djawa; mereka tumbuh dari tanah jang sama, anggota-anggota mereka terdiri dari anggota-masyarakat jang sama, jang menghadapi persoalan dan kesukaran-kesukaran ekonomi jang sama; mereka memakai satu bahasa, mempunyai satu kebudayaan, mempunyai satu tradisi dan satu sedjarah; karena itu mereka tidak boleh tidak harus mempunyai kepentingan-kepentingan ekonomi jang sama, kepentingan sosial jang sama, kepentingan kebudayaan jang sama, dan karena itu juga kepentingan politik jang sama, atau sekurang-kurangnya tidak jauh berbeda, karena jang satu dengan jang lainnya berdjalin rapat dan tak dapat dipisah-pisahkan, sebagai sudah dibuktikan oleh mereka sendiri kepada dunia, jaitu dengan sokongan mereka bersama terhadap kolonialisme Djawa dikepulauan kita ini. Mereka mempunyai satu kepentingan, jaitu kepentingan nasional Djawa jang mempersatukan mereka dalam menentang kepentingan nasional kita bangsa-bangsa luar Djawa.

Sukarno Sosrodihardjo sekarang telah mengusulkan persatuan ketiga serangkai ini setjara resmi (setjara tidak resmi sebenarnya memang mereka selalu bersatu) dalam satu kabinet " NASAKOM " katanja. " Nas " berarti Nasionalis atau PNI; " a " berarti agama atau NU; " kom " berarti komunis atau PKI. Apa jang tidak disebutkan ialah bahwa " NASAKOM " ini sebenarnya hanja satu topeng baru untuk menutup-nutup kolonialisme Djawa atas bangsa-bangsa kepulauan kita ini. Tudjuan dari pada " NASAKOM " ini ialah untuk mengabui mata dunia guna mengesankan seakan-akan pemerintah kolonialis Djawa di Djakarta itu adalah didukung oleh tiga partai besar dari berbagai aliran jang tidak ada sangkut-pautnja dengan bangsa Djawa. Pada hal jang sebenarnya ketiga-tiga partai itu adalah partai-partai Djawa sendiri dan aliran-aliran jang diwakili mereka adalah aliran-aliran Djawa sendiri djuga.

Salah satu alat jang amat penting pula dari imperialisme Djawa ialah sistem pemilihan umum jang berdasarkan menghitung kepala atas dasar partai-partai (proportional representation) jang mereka pakaskan atas kepulauan kita pada waktu mereka masih belum dapat mengelakkan pemilihan umum. Sistem ini memberi kemungkinan kepada mereka untuk akhirnya dapat menguasai kepulauan kita dengan melalui pemilihan umum sadja. Sistem pemilihan ini jang berdasarkan perhitungan kepala atas nama partai-partai -- dengan tidak mengindahkan kepentingan daerah dan kepentingan bangsa-bangsa luar Djawa -- memberi kesempatan kepada partai-partai Djawa, seperti PKI, PNI, NU dan lain sebagainya, untuk mentjari pengikut diluar Djawa, dan dengan demikian menambah jumlah suara dibawah kendali orang Djawa, melebihi dari jumlah jang menjadi hak mereka. Sistem pemilihan hitung-kepala anggota-partai ini telah menghantjurkan kepentingan daerah dan kepentingan bangsa-bangsa luar Djawa, karena sistem ini telah memindahkan kekuasaan jang menentukan dari daerah, ketangan pemuka partai-partai Djawa; sistem ini telah membuka pintu negeri dan wilayah luar Djawa dengan selebar-lebarnya untuk menjadikan daerah-daerah itu main-mainan politik orang Djawa belaka; sistem ini melindungi dan melegalkan tjampur-tangan dan intervensi kaum kolonialis Djawa dalam urusan rumah-tangga bangsa-bangsa luar Djawa dengan tidak memberikan kesempatan jang serupa kepada bangsa-bangsa luar Djawa untuk bertindak demikian terhadap urusan rumah tangga bangsa Djawa sendiri; sistem ini telah mendjerumuskan bangsa-bangsa luar Djawa dalam kantjah perpotjahan dan perebutan kedudukan jang tidak ada artinja sesama mereka sendiri, karena sistem ini membuka djalan baru bagi orang-orang setempat jang gila pangkat dan jang tidak mendapat dukungan bangsa daerahnya sendiri untuk mentjari pangkat dengan mendjilat orang-orang Djawa; djika seseorang tidak berhasil mendapat dukungan bangsanja didaerahnja sendiri untuk sesuatu kedudukan, ia dapat memasuki salah-satu partai Djawa jang mempunyai pengaruh dikalangan pemerintah kolonialis Djawa di Djakarta, dan dengan perantaraan partai ini meminta dirinja diangkat pada kedudukan jang tak dapat ditjapainja setjara demokratis tadi. Melalui sistem merusak jang menjabarkan bibit-bibit oportunisme dan perpetjahan dikalangan bangsa-bangsa luar Djawa inilah maka partai-partai Djawa telah dapat melebarkan

sajapnja sampai kepelosok-pelosok kampung bangsa-bangsa luar Djawa yang telah mengakibatkan perpetjahan dan keruntuhan bangsa-bangsa itu sendiri. Sistem ini merupakan sendjata yang tajam sekali ditangan kaum politisi Djawa dalam menjalankan politik petjah-dan-djadjah mereka atas bangsa-bangsa kepulauan kita.

* * *

V

SIFAT KOLONIALISME DJAWA DAN SIFAT INDONESIA-DJAWA

Adalah suatu pelajaran dari sedjarah bahwa suatu negara seperti Indonesia-Djawa, dimana beberapa bangsa berada dibawah penindasan satu bangsa yang tertentu, negara yang demikian itu selalu terlibat dalam dua macam peperangan: peperangan dalam negeri atau peperangan dengan luar negeri. Peperangan dalam negeri disebabkan oleh pemberontakan dari bangsa-bangsa yang tertindas dalam usaha mereka membela kepentingan nasional mereka dari perkosaan bangsa yang menindas mereka, tepat sebagaimana apa yang sudah terdjadi dinegeri kita, di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Sunda selama lebih sepuluh tahun ini. Peperangan dengan luar negeri, disebabkan oleh usaha-usaha golongan yang memerintah untuk memindahkan perhatian rakyat dari kesusahan dan kesukaran hidup kepada musuh dari luar, karena sesudah terdjadi pemberontakan-pemberontakan keadaan menjadi sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk memelihara keamanan dalam negeri kalau golongan yang memerintah dapat menakut-nakuti rakyat akan adanya bahaya serangan dari luar. Apalagi kalau dapat ditjari satu negara tetangga yang ketjil yang dapat dijadikan sasaran yang tidak begitu berbahaya. Suatu tjontoh yang menjolok mata dari politik ini ialah apa yang disebut "konfrontasi"-nya Sukarno Sosrodihardjo terhadap negara tetangga kita Malaysia yang ketjil itu.

Tetapi taktik djahat ini tidak akan selalu dapat dikendalikan, karena sedikit saja terdjadi kesalahan perhitungan dapat membawa negara penje-rang -- inilah sifat yang tak dapat dielakkan lagi dari Indonesia-Djawa -- kepintu gerbang keruntuhannya. Sesuatu peperangan dengan negara luar, walaupun dilakukan oleh Indonesia-Djawa, mempunyai arti melibatkan diri dan bermain-main dengan keseimbangan kekuasaan di dunia, dengan segala akibatnya yang sangat berbahaya. Walaupun kekuatan militer Indonesia-Djawa mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan kekuatan militer Malavsia, tetapi kekuatan militer semua negara dalam sesuatu peperangan dengan negara lain adalah relative, artinja lebih-kurang dan bergantung pada beberapa faktor yang lain. Kekuatan militer sesuatu negara tidaklah mempunyai arti apa-apa ketjuali bila dibandingkan dengan kekuatan militer dari negara yang hendak diserangnya tambah dengan kekuatan militer negara-negara sekutu dari negara yang hendak diserang itu. Karena itu untuk "menggajang

Malaysia", Sukarno Sosrodihardjo memerlukan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan militer Malaysia tambah dengan kekuatan militer negara-negara sekutu Malaysia, yaitu Australia, New Zealand dan keradjaan Inggris. Teranglah sudah bahwa Sukarno Sosrodihardjo tidak akan pernah dapat mengatasi ini. Tetapi suatu peperangan gerilja ketjil-ketjilan diperbatasan Serawak dan Sabh mungkin ada gunanya bagi Sukarno Sosrodihardjo sekedar untuk memalingkan perhatian rakyat yang melarat didalam negeri kepada musuh dari luar yang tentunya akan dipersalahkan sebagai yang bertanggung djawab atas kebobrokan ekonomi dalam negeri Indonesia-Djawa, walaupun sebenarnya segala kebobrokan itu adalah buah tangan kaum kolonialis Djawa sendiri. Demikian juga dengan adanya peperangan diperbatasan dengan Malaysia ini Sukarno Sosrodihardjo dan kaum kolonialis Djawa yang lain mengharapkan agar dengan demikian peperangan dalam negeri yang sebenarnya lebih berbahaya bagi mereka dapat dielakkan.

Kaum kolonialis Djawa dewasa ini sudah sampai pada taraf kedudukan kaum pendjadjah yang sulit, dimana oleh karena perkembangan sosial dan politik, mereka akan selalu harus memilih salah satu diantara dua perkara yang berbahaya ini: menghadapi peperangan dalam negeri, atau menghadapi peperangan dengan luar negeri. Kalau pada suatu saat yang bersedjarah kedua macam peperangan ini akan terdjadi pada waktu yang sama dan serentak, maka hari itu akan merupakan hari berachirnja dan hari musnahnja kolonialisme Djawa dikepulauan kita, dan hari tibanja kemerdekaan yang sedjati bagi bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian Barat, Bali, dan Sunda, ketika kedaulatan atas negeri-negeri mereka masing-masing akan kembali ke tangan mereka sendiri!

Sedjarah bangun dan djatuhnja keradjaan Austria-Hongaria akan memberikan pelajaran dan teladan yang sangat berguna kepada penindjau-penindjau kehidupan kolonialisme Djawa di kepulauan kita, dan tentang kepastian kehancuran kolonialisme Djawa ini. Keradjaan Austria-Hongaria adalah satu keradjaan yang rakjatnja terdiri dari bangsa-bangsa Eropah Tengah yang ditaklukkan, seperti bangsa Tjek, bangsa Slovak, bangsa Serbia, bangsa Croatia, bangsa Polandia, bangsa Yugoslavia, dan beberapa lagi yang lain. selama ~~sa~~ berdirinja, keradjaan Austria-Hongaria selalu terlibat dalam dua macam peperangan, adakalanya peperangan dalam negeri, adakalanya peperangan dengan luar negeri. Oleh karena ia selalu terlibat dalam peperangan, keradjaan ini achirnja berubah sifatnja menjadi keradjaan militer semata-mata. Peperangan dalam negeri-nja disebabkan oleh pemberontakan yang tiada berhenti-hentinja dari bangsa-bangsa yang tertindas yang mentjoba mendapatkan kemerdekaan mereka kembali; sedang peperangan dengan luar negeri ditimbulkan oleh usaha pemerintah Austria-Hongaria untuk memalingkan perhatian rakyat kepada musuh dari luar, untuk dapat memelihara keamanan dalam negeri. Untuk beberapa waktu kekuasaan pemerintah Austria-Hongaria telah dapat dipertahankan berkat politik petjah-dan-djadjah merdeka, dengan mengirimkan pasukan-pasukan Tjek untuk menindas pemberontak-pemberontak Slovakia, mengirimkan bataljon-bataljon Slovakia untuk menundukkan pemberontak-pemberontak Polandia, dan demikianlah seterusnya, sama sebagai perbuatan Sukarno Sosrodihardjo mengirimkan pasukan-pasukan Minangkabau untuk menjerang Atjeh, dan mengirimkan pasukan-pasukan Atjeh

menduduki Maluku, mengirimkan pasukan-asukan Maluku menjerang Sulawesi, dan demikianlah seterusnya, suatu politik petjah-dan-djadjah yang begitu terkenal kepada kita semua: Keradjaan Austria-Hongaria terlibat dalam segala peperangan besar dan ketjil yang terdjadi sebelum kehantjuranja ditahun 1918.

Diachir tahun 1914 pemerintah Austria-Hongaria melakukan suatu kesalahan politik yang besar, jaitu melibatkan dirinja dalam peperangan dengan luar negeri pada waktu dan saat yang salah, walaupun disebabkan oleh provokasi yang besar, jaitu dibunuhnja putera mahkota Austria-Hongaria oleh kaum revolusioner Serbia di Serajevo. Peperangan yang dimulai oleh Austria-Hongaria terhadap keradjaan Serbia yang ketjil itu telah menggontjangkan keseimbangan kekuasaan antara negara-negara besar di Eropah yang membawa kepada pertjampuran tangan mereka yang achirnja menimbulkan Perang Dunia ke I. Bangsa-bangsa yang tertindas dibawah kekuasaan pemerintah Austria-Hongaria mengambil kesempatan itu untuk menjatakan diri mereka merdeka atas dasar hak mereka untuk menentukan nasib diri-sendiri, suatu hak yang dipunjai oleh segala bangsa. Demikianlah, atas runtuhannya negara Austria-Hongaria timbullah beberapa negara baru: Tjekoslovakia, Polandia, Yugoslavia, Austria dan Hongaria.

* * *

VI

KAUM KOLONIALIS DJAWA TIDAK SANGGUP MEMBANGUN KEPULAUAN KITA

Oleh karena Indonesia-Djawa selalu terlibat dalam peperangan, baik peperangan dalam negeri, maupun peperangan dengan luar negeri, maka tidak pernah ada kesempatan untuk membangun dan mentjapai kemadjuan, sebagaimana sudah ternjata selama duapuluh tahun ini, dan tidak akan ada kesempatan untuk membangun itu dimasa yang akan datang selama Indonesia-Djawa masih berdiri sebagai sekarang. Pada waktu seluruh dunia sudah selesai dibangunkan kembali dari runtuhannya puing Perang Dunia ke-II, kaum kolonialis Djawa, dalam masa duapuluh tahun ini, sudah "berhasil" merusakkan segala apa yang sudah ada lebih dahulu di Tanah Ibu, kampung-halaman kita. Mereka sudah merampok apa yang dapat mereka ambil dinegeri-negeri kita dari Atjeh sampai ke Maluku. Mereka sudah membakar rumah-rumah kita, merampas harta-benda kita, dan membawa segala yang mereka bisa bawa ke Djawa. Sukarno Sosrodihardjo sedang membangun negerinja sendiri --pulau Djawa--dengan kekayaan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Bali.

Tetapi sebenarnya kaum kolonialis Djawa tidaklah mempunyai ketjaksanaan dan kesanggupan untuk membangun kepulauan kita, sebagaimana telah ternjata dan terbukti dengan seterang-terangnja selama duapuluh tahun ini. Hal ini disebabkan, terutama sekali, oleh hal-hal yang berikut:

Pertama, suasana yang tidak berketentuan, ketidak-adilan, korupsi, penindasan, inflasi, birokrasi dan peperangan yang terus-menerus, yang ke

semuanya adalah pertanda dan "trademark" dari Indonesia-Djawa, tidaklah memungkinkan pembangunan, kemajuan, dan civilisasi. Dibawah "pimpinan" kaum kolonialis Djawa kita akan dipaksa untuk kembali ke zaman djahiliyah, ke zaman kegelapan, ke zaman siksaan, dan ke zaman pembakaran kitab dan buku-buku!

Kedua, kepentingan bangsa Djawa sebagai satu golongan adalah berlainan sekali dari kepentingan nasional kita bangsa-bangsa Sumatera Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, dan lain-lain. Perbedaan kepentingan nasional antara kita dengan bangsa Djawa itu begitu besar sehingga kalau kita tidak bodoh sebenarnya kita tidak akan membolehkan mereka menentukan bagaimana rumah-tangga kita harus diatur. Perbedaan antara kepentingan nasional kita dengan kepentingan nasional mereka, dan antara persoalan hidup kita dengan persoalan-persoalan hidup mereka adalah begitu besar sehingga kita tidak dapat mengharapkan mereka dapat memahami persoalan-persoalan hidup kita, apalagi mengharapkan mereka menyelesaikan persoalan-persoalan itu untuk kita. Sesungguhnya kita tidak ada alasan untuk berada dalam satu negara dengan mereka, apalagi dibawah mereka.

Sebagai tjontoh, marilah kita perbintjangkan satu persoalan penghidupan yang paling penting bagi bangsa Djawa sekarang ini, yaitu persoalan "kele-bihan" penduduk. Oleh karena persoalan ini, maka kebutuhan bangsa Djawa yang terpenting sekarang ini ialah persoalan pembagian tanah ("land reform"). Tetapi untuk kita di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain, ini adalah soal yang paling ketjil, bahkan sama sekali bukan satu soal yang perlu kita hadapi dalam abad ini! Tetapi oleh karena kita hidup dalam satu negara dibawah genggaman orang Djawa, maka kepentingan kita sudah dile-takkan dibawah kepentingan mereka, hak-hak kita sudah dikorbankan untuk kesenangan mereka: karena orang Djawa membutuhkan pembagian tanah, maka tanah kita, -- bukan tanah mereka! -- di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain, yang dibagi-bagikan kepada orang-orang Djawa. Ini adalah suatu perampokan setjara besar-besaran. Tak ada suatu bangsapun didunia ini, baik di Timur ataupun di Barat yang akan menerima perkosaan hak mereka setjara ini dengan tidak memberi perlawanan.

Walaupun kita pada waktu ini belum mempergunakan seluruh tanah kita, tetapi kepentingan nasional kita masing-masing menghendaki kita memelihara setiap djengkal Tanah Ibu, kampung-halaman kita masing-masing untuk keturunan kita dimasa yang akan datang. Perhitungan ilmu demography sudah membuktikan bahwa pada umumnya penduduk tiap-tiap negeri mendja-di berlipat-ganda dalam tiap-tiap satu keturunan, yaitu tiap-tiap 20 tahun: kalau umpamanja pada tahun 1965 penduduk Sumatera berdjumlah 20 djuta, maka 20 tahun kemudian, yakni ditahun 1985, penduduk Sumatera akan mendjadi 40 djuta; 20 tahun kemudian, yakni ditahun 2005, penduduk Sumatera akan mendjadi 80 djuta; dan dalam satu keturunan sesudah itu, yaitu ditahun 2025 Sumatera akan berpenduduk 160 djuta. Oleh karena itu adalah satu per-tanjaan yang sangat penting yang harus kita djawab sekarang ini djuga: bagaimanakah kita bangsa Sumatera dapat mendjamin penghidupan yang patut kepada turunan kita yang bakal berdjumlah 160 djuta, dalam waktu yang hanya 60 tahun lagi itu? Dalam pada itu haruslah djangan kita lupakan walaupun

sedjenak, bahwa sedang djumlah penduduk kita berlipat-ganda setiap 20 tahun itu, tetapi tanah kita, Sumatera kita, tetap seluas sekarang djuga; sedang penduduk kita bertambah-banjak, tanah kita tidaklah bertambah luas walaupun satu djengkal! Oleh karena itu maka kepentingan nasional Sumatera menghendaki kita harus mendjaga setiap djengkal bumi Sumatera -- dari Kutaradja sampai ke Telukbetung -- tetap ditangan bangsa Sumatera. Kalau turunan kita nanti tidak dapat hidup lagi di Sumatera karena kepada -- tan penduduknja, djanganlah diharapkan mereka akan dapat pindah ke negri lain. Tak ada satu negarapun didunia jang akan menerima mereka. Inilah latar-belakang dan pertimbangan-pertimbangan jang telah melahirkan undang-undang immigrasi dari segala bangsa didunia, dan inilah sebabnja mengapa tidak ada satu bangsa jang bersedia membiarkan negerinja didatangi begitu sadja oleh pengungsi bangsa lain. Semua bangsa jang beradab didunia telah membuat perhitungan jang sematjam ini untuk mendjamin kehidupan keturunan mereka. Apakah kita bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku Kalimantan, dan lain-lain telah menunaikan tanggung-djawab kita kepada keturunan kita? Inilah tanggung-djawab kita generasi jang sudah lahir terhadap generasi jang belum lahir: untuk memelihara tanah pusaka kita dlm keadaan tetap-bulat dan tidak retak, sebagaimana kita telah menerimanja dari nenek-mojang kita. Keturunan kita tidaklah mempunjai orang lain untuk memikirkan kepentingan mereka selain kita sendiri. Kalau hal jang sepeenting ini kita lalaikan, kita akan ditjap dalam sedjarah kita sebagai nenek-mojang jang berotak udang!

Tetapi tidakkah kita sekarang sedang membiarkan Tanah Ibu kita dibagi untuk orang Djawa jang didatangkan berdujun-dujun ketengah-tengah kita? Pada saat kita membiarkan hal ini terdjadi, maka pada saat itu djuga berarti kita sudah menjatuhkan hukuman atas pundak turunan kita jang belum lahir untuk hidup bergelandangan dengan tak ada lagi sawah dan ladang mendjadi seperti orang merantau diatas persada tanah pusaka mereka sendiri. Disaat hal ini kita biarkan, maka kita sudah menghantjurkan masa depan anak-tjutju kita: kita sudah mendjual tanah pusaka mereka, membagi-bagikannja kepada kaum kolonialis Djawa jang bakal mendjadjah mereka, bahkan hal inilah jang akan mendjamin tetap terdjadjahnja mereka untuk selama-lamanja; karena pemindahan penduduk sebenarnja adalah satu bentuk pendjadjahan jang paling berbahaja, djauh lebih berbahaja dari pendjadjahan biasa. Pemindahan penduduk adalah satu pendjadjahan jang kekal, jang sekali didjalankan tidak akan dapat dihapuskan lagi. Pendjadjahan dalam bentuk lain dapat dihapuskan dengan mudah: pendjadjahan Belanda telah datang dan pergi, pendjadjahan Djepang telah masuk dan keluar, tetapi pendjadjahan dengan pemindahan penduduk adalah pendjadjahan jang akan kekal, jang tak dapat diusir lagi, karena sipendjadjah akan mengerumuni kita, mengikat tangan dan kaki kita sehingga kita tidak akan dapat memerdekakan diri lagi.

Dalam bukunja Il Prinsep, jang ditulis 400 tahun jang silam, Niccolo Machiavelli menguraikan bagaimana keradjaan-keradjaan besar di zaman jang silam telah mempergunakan pemindahan penduduk sebagai tipu-muslihat untuk mendjadjah bangsa-bangsa dan negara-negara lain.

Machiavelli menulis:

"Suatu djalan lain yang mudah (untuk mendjadjah) ialah dengan mengirinkan pengungsi atau melakukan pemindahan penduduk ke beberapa tempat supaya mereka itu menjadi kuntji untuk menguasai sesuatu daerah; inilah yang harus dilakukan, atau kalau tidak, maka haruslah dikirim tentera dan pasukan-pasukan bersenjata. Pendjadjah: tidaklah perlu melakukan pengeluaran wang yang banyak untuk keperluan orang-orang yang dipindahkan itu. Pengungsi-pengungsi itu dapat dikirim keluar dengan pertjuma atau dengan biaja yang sedikit sekali bagi sipendjadjah. Mereka yang tidak senang kepada pengungsian itu hanyalah penduduk-penduduk asli yang tanah dan rumah mereka telah diambil untuk diberikan kepada pengungsi-pengungsi baru itu. Tetapi orang-orang yang hak mereka sudah dilanggar dan hati mereka sudah disakiti ini, hanya merupakan golongan penduduk yang ketjil djumlahnja. Dan karena mereka itu bertjerai-berai dan miskin, maka mereka itu tidaklah membahayakan. Sedang golongan lain yang dibiarkan sendiri dan tidak diganggu dengan sendirinja mudah didiamkan, dan merekapun tidak berani berbuat salah karena mereka takut akan mengalami nasib sebagai tetangga mereka yang sudah dirampas harta-benda dan tanahnja.

Pendeknja, pemindahan penduduk ini, biajanja lebih murah dari biaja tentera, mereka lebih setia dari tentera, dan mereka mendapat tentangan yang djauh lebih kurang. Sedang penduduk asli yang sudah disakiti dan dirampas harta-benda dan tanahnja, oleh karena mereka itu bertjerai-berai dan miskin, mereka tidaklah berdjaja untuk melawan pendjadjalnja. Tetapi djika tentera yang dikirimkan dan bukan pengungsi-pengungsi, biajanja akan besar sekali dan segala hasil dari pajak dan kekajaan negeri itu akan habis dipakai untuk mengawal dan mendjaganya, sehingga apa yang mestinja laba akan menjadi rugi. Djuga penggunaan tentera akan lebih menjakutkan hati penduduk asli, karena perpindahan tentera dari satu tempat ketempat yang lain, menjusahkan seluruh penduduk, dan karena semua mereka merasa kesusahan dan penindasan, semuanya akan menjadi musuh... Oleh karena itu, ditilik dari segala sudut, maka tjara mendjaga dan mempertahankan pendjadjahan dengan pemindahan penduduk adalah djauh lebih menguntungkan dari pada dengan merakakai tentera. Keradjaan Roma telah mendjalankan politik pendjadjahan dengan pemindahan penduduk ini terhadap daerah-daerah yang mereka kuasai dengan tjermat sekali. Mereka mendirikan daerah-daerah kolonisasi dan daerah-daerah pemindahan penduduk, dan mereka membudjuk bangsa-bangsa yang lemah untuk lebih melemahkan mereka itu lagi...."

Alasan ketiga, mengapa kaum kolonialis Djawa tidak mempunyai kesanggupan untuk membangun kepulauan kita ialah karena tjara mereka itu berpikir yang sangat fanatik pada tahjul dan dongeng sistem ekonomi paksaan komunis dan sosialis totaliter dalam membangun kepulauan kita sudah njata - njata tidak berhasil, sebagaimana telah terbukti selama masa satu

keturunan kita ini, dan tidak akan berhasil dimasa yang akan datang, oleh karena alasan-alasan berikut:

a) Kebutuhan-kebutuhan hidup dan tujuan-tujuan ekonomi dari berbagai-bagai bangsa yang berdjumlah lebih seratus djuta manusia yang berse-
rak-serak diatas permukaan bumi sepanjang 4500 kilometer disekitar chat
tulistiwa, yang satu bagiannya terpisah dan tidak mempunyai hubungan apa-
apa dengan bagian lainnya, dan terdiri dari bangsa yang berlain-lainan yang
masing-masing mempunyai masalah ekonominya sendiri-sendiri yang djauh
berbeda dari yang lain-lain, kepentingan ekonomi dari bangsa-bangsa yang
begini tidaklah dapat diperhitungkan dan direntjanakan dengan tepat dari ha-
nja satu pusat yang tertentu saja. Rentjana pembangunan ekonomi bagi
bangsa-bangsa dan negeri-negeri yang bersifat seperti ini hanya bisa dilaku-
kan sendiri-sendiri, dan masing-masing, oleh bangsa-bangsa dan di negeri-
negeri yang bersangkutan itu sendiri. Dalam keadaan yang sekarang satu-
satu perkara yang dapat direntjanakan lebih dahulu dan dapat diketahui dgn
pasti-pasti hanyalah kebutuhan militer saja, karena hal inilah yang paling
mudah diperhitungkan: oleh karena itu maka rentjana "pembangunan ekonomi"
dari sesuatu negara yang sematjam ini, seperti halnya dengan Indonesia-
Djawa, dialam kenyataan telah menjadi pembangunan kemiliteran sebagai -
mana yang sudah terdjadi dan sudah merupakan satu kenyataan. "Pembangu-
nan" yang sematjam ini telah melahirkan militerisme di kepulauan kita dan
bukan kemakmuran bagi bangsa-bangsa kepulauan kita.

b) Rentjana pembangunan ekonomi yang berhasil untuk sesuatu daerah jg
sangat luas, dan untuk suatu penduduk yang sangat banyak, menghendaki pe-
nentuan yang mutlak tentang tudjuan ekonomi nasional (national economic
objectives) yang mana diambil dari pengertian yang tegas-tegas tentang ke-
pentingan kebangsaan (national interests). Oleh karena kepentingan kebang-
saan, dan karenanya kepentingan ekonomi dari bangsa Djawa itu begitu besar
perbedaannya dari kepentingan kebangsaan dan kepentingan ekonomi kita
bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan sebagainya,
maka tidaklah mengherankan kalau orang Djawa telah menempatkan kepen-
tingan kebangsaan dan kepentingan ekonomi Djawa diatas dari kepentingan
kebangsaan dan kepentingan ekonomi bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, Maluku dan sebagainya. Ini berarti kepentingan ekonomi bangsa
bangsa yang bukan Djawa akan diletakkan dibawah kepentingan ekonomi bang-
sa Djawa. Ini berarti pula bahwa bangsa-bangsa yang bukan Djawa akan ha-
rus menunggu perbaikan kehidupan ekonomi mereka sampai sesudah orang
Djawa, "bangsa tuan-tuan", sudah diperbaiki kehidupan ekonomi mereka le-
bih dahulu. Tidak sjak lagi, ini adalah suatu penungguan yang hanya bisa ber-
akhir dengan hari kiamat.

c) Oleh karena segala rentjana pembangunan ekonomi negara, sekali su-
dah ditetapkan haruslah didjalankan, kalau perlu dengan memakai alat-alat
kekerasan negara, maka pelaksanaan rentjana pembangunan ekonomi Djawa
di kepulauan kita berarti pemakaian alat kekuasaan negara Indonesia-Djawa
untuk menguasai segala sumber-sumber kekayaan alam seluruh kepulauan
kita untuk kepentingan dan kesenangan golongan kolonialis Djawa yang me-
ngendalikan dan menguasai pemerintahan ini.

d) Rentjana pembangunan ekonomi totaliter menghendaki bahwa segala kegiatan ekonomi dari seluruh rakyat haruslah disesuaikan dengan rentjana ekonomi pemerintah, dan bukan dengan kemauan atau keinginan golongan-golongan rakyat. Segala kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan rentjana pemerintah haruslah dilarang. Karena itu maka rentjana ekonomi totaliter selalu disertai oleh pemaksaan kekerasan setjara besar-besaran, yang mana berarti pemerintahan sewenang-wenang dan diktatoran. Dalam teori-nja sosialisme dan komunisme menghendaki penggantian kekuasaan perseorangan tuan-tuan tanah yang lama dengan kekuasaan badan-badan negara yang baru, tegasnja penggantian kekuasaan pribadi dengan kekuasaan rakyat banyak. Tetapi teori ini sebenarnya omong-kosong belaka, karena sebagai dapat diperhatikan dialam kenyataan oleh siapapun djuga, sistem sosialis totaliter dan komunis selalu memerlukan diktator, atau apa yang disebut mereka "pemimpin besar", untuk mentjapai, atau lebih tepat untuk mentjoba mentjapai maksudnja, tegasnja penggantian tuan-tuan tanah perseorangan (yang sekurang-kurangnya mempunyai hak-hukum atas tanahnja, dan "kekuasaan"-nja atas negara sangat ketjil) dengan tuan tanah yang baru, yang tidak mempunyai hak-hukum sama sekali, dan yang bulat-bulat menguasai negara sebagai miliknya sendiri. Demikianlah sosialisme Rusia telah memerlukan Stalin, komunis Tionghoa telah memerlukan Mao Tse-Tung, "sosialisme ala Indonesia-Djawa" memerlukan Sukarno Sosrodihardjo!

e) Dasar organisasi sosialisme dan komunisme ialah tata-usaha yang rapi dan tjermat. Suatu ekonomi merdeka dan bebas masih dapat berdjalan dan hidup walaupun dengan urusan tata-usahanja yang tidak tjermat dan tidak rapi. Tetapi satu ekonomi sosialis atau komunis tidak akan dapat berdjalan dengan tidak ada rentjana yang tjermat dan tata-usaha yang rapi. Sjarat inilah yang tidak dapat dipenuhi oleh kaum kolonialis Djawa. Orang Djawa masih belum mempunyai ketjapakan untuk menjusun rentjana ekonomi yang tjermat, mereka belum mempunyai kesanggupan mendjalankan suatu sistem tata-usaha yang rapi. Rentjana-rentjana ekonomi mereka yang selalu lebih mentjingkan kepentingan Djawa sudah pasti mendapat tentangan, setjara terang-terangan atau setjara diam-diam, dari bangsa-bangsa luar Djawa. Kaum kolonialis Djawa masih termasuk golongan bangsa-bangsa terkebelakang, mereka tidak lebih dari kita di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, atau Bali. Mereka malah belum mempunyai kesanggupan untuk mengurus ekonomi mereka sendiri, betapa lagi untuk mengurus ekonomi kita! Perbuatan mereka meruntuhkan ekonomi kita selama masa 20 tahun, sudah lebih dari tjukup untuk membuktikan ketiadaan kesanggupan mereka dalam hal ini.

f) Achirnja, sosialisme berarti penguasaan dari satu pusat kekuasaan atas ekonomi nasional dan kekajaan nasional. Sekali lagi ini berarti dalam kenyataan penguasaan oleh kaum kolonialis Djawa atas segala-galanya di tanah air kita. Kaum kolonialis Djawa sudah berhasil memakai dan memperalat nama sosialisme untuk menutup imperialisme mereka yang loba dan tamak itu. Sosialisme dan komunisme membenarkan penguasaan dari satu pusat, dan penguasaan dari satu pusat ini meletakkan segala kekajaan perseorangan dan kekajaan bangsa-bangsa dari seluruh bagian dunia kita ini dalam djengkauan kaum kolonialis Djawa. Apa yang disebut mereka sebagai

"sosialisme a la Indonesia" sebenarnya tidak lain dari pada satu topeng lagi untuk menutup kolonialisme Djawa di kepulauan kita.

Sekarang kiranya djelaslah sudah bahwa djalan Indonesia-Djawa, diilik dari sudut manapun djuga, telah dan bakal terus-menerus menjeret kita kedalam kantjah penindasan, korupsi, ketidak-adilan, kekedjaman, kediktatoran, peperangan dan keruntuhan!

* * *

VII

INDONESIA-DJAWA BAHAJA BAGI PERDAMAIAN DUNIA

Keluar negeri, sebagaimana halnja djuga kedalam negeri, Indonesia-Djawa sudah mendjadi satu penjakit dan satu bahaja jang mengantjam perdamaian dan ketenteraman di Asia Tenggara. Pertama sekali, dizaman modern ini, dan dalam dunia kita dimana satu bagian dunia saling bergantung dan berhubungan dengan bagian lainnja, persiapan perang dalam sesuatu negara bukan hanja mempengaruhi penghidupan rakjat negara itu sendiri, tetapi djuga akan mempengaruhi penghidupan rakjat dari seluruh negaranegara tetangganya. Dalam hal ini, persiapan perang jang dilakukan oleh Indonesia Djawa, mau tidak mau, akan harus diikuti oleh persiapan perang oleh negara-negara tetangga, djika mereka mengetahui kepentingan nasional mereka sebagaimana kebanyakan bangsa memang mengetahuinja. Tak ada satu negarapun didunia ini, jang mengetahui kepentingannya, dapat membiarkan kekuatan militer jang terlalu berlebih-lebihan dari sesuatu negara tetangganya. Djika keadaan jang demikian sampai timbul, maka keseimbangan kekuatan haruslah dikembalikan dengan segera, dengan mengadakan pula kekuatan jg tjukup besar untuk mengimbangi kekuatan negara tetangga jang pertama tadi. Sedang bagi negara-negara tetangga jang ketjil, keadaan ini dapat dan harus diatasi dengan mengadakan persekutuan dengan negara-negara lain jg mempunjai kepentingan jang sama. Oleh karena itu, persiapan perang Indonesia-Djawa langsung mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi dan kemasjarakatan rakjat di Malaysia, Pilipina, Australia, New Zealand, dan lain-lain, karena negara-negara itu haruslah memperkuat pertahanan mereka pula, jang mana berarti membuang-buang wang jang seharusnya dapat dipakai untuk alat-alat kemakmuran, untuk membeli sendjata kemiliteran jang tidak menghasilkan apa-apa itu. Djadipolitik kaum kolonialis Djawa bukan s saja telah merusakkan kemakmuran bangsa-bangsa kita di Sumatera, Suwes, Kalimantan, Maluku, Bali, Sunda dan lain-lain, tetapi djuga merusakkan kemakmuran rakjat negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Pilipina, Australia, New Zealand, dan lain-lain.

Kedua, kebutuhan jang tidak habis-habisnja dari Indonesia-Djawa untuk selalu harus mempunjai antjaman peperangan dengan luar negeri guna untuk memelihara keamanan didalam negeri, mendjadikan seluruh negara-negara tetangga tidak aman, lebih-lebih negara tetangga jang ketjil. Bahwa

Malaysia sudah dijadikan mangsa yang kedua dari agresi Indonesia-Djawa sesudah Irian Barat, tidaklah mengherankan sama-sekali; dan pasti pula bahwa Malaysia bukanlah sasarannya yang terakhir.

Ketiga, akibat strategis dari didjadjabnja Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Irian Barat, dan lain-lain, oleh Djawa adalah mentjelaskan kesentosaan dan keamanan bagian dunia kita ini, karena ini berarti pengbantjuran keseimbangan kekuasaan dalam Dunia Melaju, dan karena itu juga di Asia Tenggara. Ketiadaan keseimbangan kekuasaan dalam Dunia Melaju yang maha luas ini, karena didalamnya hanya tinggal dua buah negara yang sangat tidak seimbang, yang satu Indonesia-Djawa dengan penduduk lebih 100 djuta dan daerah seluas satu benua, dan yang satu lagi, Malaysia, dengan penduduk hanya 10 djuta dan daerah yang ketjil dibandingkan dengan Indonesia-Djawa, maka hal inilah menurut dasar-dasar dan prinsip-prinsip keseimbangan kekuasaan (balance of power) yang mendjadi sumber dan asal-usul yang terpenting dari keadaan dan situasi sekarang, yakni pertjeban dari Indonesia-Djawa untuk menelan Malaysia. Sudahlah terang bahwa Malaysia tidak akan dapat mempertahankan dirinya dengan tidak memasuki i dalam sesuatu persekutuan dengan negara-negara lain dari luar Dunia Melaju. Halnja sama juga dengan Filipina, walaupun orang-orang Filipina sekarang sedang menipu diri dengan mendjilat-djilat kaum kolonialis Djawa. Filipina tidak akan dapat mempertahankan dirinya dari serangan Indonesia-Djawa ketjuali dengan perlindungan dari sesuatu persekutuan dengan sesuatu negara besar dari luar Asia Tenggara ini. Australia dan New Zealand juga mempunjai nasib yang sama. Djadi teranglah sudah bahwa Indonesia-Djawa adalah satu babaja besar, bukan sadja bagi perdamaian kita bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Irian, Sunda dan lain-lain, tetapi juga bagi perdamaian bangsa-bangsa Malaysia, Filipina, Australia dan New Zealand.

Keempat, dalam usahanya yang terus-menerus untuk mengadakan peperangan dengan luar negeri, sudah tentu Indonesia-Djawa akan berusaha untuk mendapatkan negara-negara ketjil dan lemah untuk didjadikan sasarannya, agar peperangan yang dilakukannya itu dapat dibatasi dan dikendalikan. Tetapi tiap-tiap peperangan itu adalah merupekan suatu permainan pertaruban. Tak ada suatu peperangan yang 100% dapat dikendalikan. Lebih-lebih dizaman modern ini, segala peperangan, bahkan peperangan yang ketjil, dapat merembet mendjadi peperangan besar, bahkan mendjadi perang dunia, manakala peperangan ketjil ini menjinggung dan menjintuh keseimbangan kekuasaan didunia antara negara-negara besar. Perang Dunia ke-I telah dimulai oleh negara Austria-Hongaria -- suatu tjontoh yang terdahulu dari Indonesia-Djawa -- sebagai satu peperangan ketjil untuk memalingkan perhatian rakjat dari kemerosotan keadaan didalam negeri kepada musuh dari luar negeri. Peperangan ini telah dilakukan terhadap keradjaan Serbia yang sangat ketjil itu. Tetapi perang terhadap Serbia yang ketjil inilah yang kemudian diannja merembet-rembet mendjadi Perang Dunia ke-I. Juga Perang Dunia ke-II telah dimulai dengan peperangan ketjil "setempat" oleh Hitler terhadap Polandia. Tetapi peperangan setempat Hitler ini telah menjinggung keseimbangan kekuasaan di Eropah yang tidak dapat dibiarkan oleh negara-

negara lain dan yang akhirnya merembet-rembet menjadi Perang Dunia ke II. Oleh karena itu sesuatu negara yang memakai peperangan sebagai alat politik kenegaraannya -- sebagaimana halnya dengan Indonesia-Djawa -- negara itu mungkin sekali akan menyebabkan timbulnya krisis internasional yang akan membawa kepada peperangan besar yang dapat melibatkan seluruh dunia. Karena itu pula maka politik kaum kolonialis Jawa bukan saja telah mengantjam keamanan dan kesentosaan kita di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain, tetapi juga mengantjam keamanan dan kesentosaan Asia Tenggara dan seluruh dunia.

* * *

VIII

KELEMAHAN-KELEMAHAN IMPERIALISME DJAWA

Dalam pada itu, imperialisme Jawa adalah satu imperialisme yang paling lemah dalam sejarah dunia; sebenarnya ia merupakan suatu paradox, suatu keadaan yang sangat menjolok-mata di abad ke 20 ini. Semua imperialisme dalam sejarah modern adalah imperialisme dari bangsa-bangsa yang sudah berindustri atas bangsa-bangsa tani. Kekuatan industri merekalah yang telah membuat bangsa-bangsa Eropah dapat mendjadjah Asia, Afrika dan Latin Amerika dimasa yang lampau. Tetapi bangsa Jawa masih satu bangsa yang masuk golongan bangsa-bangsa yang masih berekonomi tani. Kolonialisme Jawa adalah satu kolonialisme yang dilakukan oleh satu bangsa tani atas bangsa-bangsa tani yang lain. Orang Jawa tidak mempunyai industri, mereka tidak tahu bagaimana membuat sendjata, oleh karena itu mereka tidaklah mempunyai sumber kekuatan sendiri untuk dapat terus-menerus mendjadjah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Sunda dan lain-lain, jika putera-putera negeri-negeri itu menjatakan kemerdekaan mereka.

Segala sendjata yang merupakan alat kekuasaan yang berada dalam telapak tangan kaum kolonialis Jawa adalah sendjata-sendjata yang telah diberikan kepada mereka oleh bangsa-bangsa berindustri dari luar negeri. Orang Jawa masih tidak pandai menghasilkan sendiri walaupun seputjuk pistol! Karena itu kontrolle atau penguasaan mereka atas kepulauan kita ini adalah berdasarkan atas kesanggupan mereka untuk mengontrolle atau menghambat masuknya alat-sendjata ke bagian dunia kita ini dari negeri-negeri luar. Oleh karena kaum kolonialis Jawa tidaklah mempunyai kontrolle atas produksi sendjata didunia, demikian juga mereka tidaklah mempunyai kontrolle atas alat-alat pengangkutan dan perkapalan dunia, maka sebenarnya mereka tidaklah mempunyai kontrolle yang sesungguhnya atas masuknya alat-alat sendjata ke kepulauan kita, jika negara-negara asing menolak dakwaan kaum kolonialis Jawa yang palsu, tidak adil, dan tidak bertakut itu, yakni bahwa Indonesia-Djawa, pengganti Hindia-Belanda itu, mempunyai hak memegang kedaulatan atas bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Kalimantan,

Maluku, Bali, Sunda, dan lain sebagainya. Negara-negara luar akan menolak dakwaan bohong kaum kolonialis Djawa ini jika bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, dan lain-lain akan menandatangani kemerdekaan mereka kepada dunia, dan bila ini dilakukan mereka pun akan dapat berhubungan sendiri dengan langsung dengan seluruh dunia.

Apa yang sudah terdjadi ialah bahwa bangsa-bangsa berindustri telah terlandjur mengakui kepulauan kita sebagai negara Indonesia-Djawa, oleh karena kesalahan politik yang kita lakukan sendiri ditahun 1945. Kaum kolonialis Djawa sudah mempergunakan kenjataan pengakuan ini untuk menghambat negara-negara asing membolehkan pengiriman senjata kepada kepulauan kita, walaupun kita dapat membelinya, kalau tidak seizin Djawa. Teranglah sudah bahwa ini adalah suatu tempat berpidjak yang sangat rapuh untuk mendirikan dan mempertahankan sesuatu imperialisme. Sesungguhnya imperialisme Djawa itu sudah dapat ditegakkan oleh karena dibiarkan oleh bangsa-bangsa berindustri, dan dengan bantuan politik dan bantuan moral dari mereka, karena mereka itu sebenarnya tidak mengetahui apa yang sudah dan sedang terdjadi di kepulauan kita. Karena itu imperialisme Djawa adalah satu imperialisme yang bersandarkan pada propaganda bohong dan penipuan pendapat umum diluar negeri. Sekali propaganda bohong dan penipuan ini dibuka kedoknya diluar negeri, imperialisme Djawa tidak akan dapat dipertahankan lagi, karena pemeliharaannya bergantung pada kemurahan hati dan belas-kasihan negara-negara industri dari bagian dunia yang lain.

Inilah satu imperialisme yang tidak mempunyai alat untuk mempertahankannya sendiri, karena ia tidak mempunyai sumber-sumber industri untuk tempat berpegang. Imperialisme Djawa ini bergantung 100% pada belas-kasihan bangsa-bangsa berindustri dari kedua-belah pihak dari tirai-besi untuk mengakui penguasaan Djawa atas seluruh kepulauan kita. Satu-satunya jalan yang terbuka kepada kaum kolonialis Djawa untuk mempertahankan kedudukan mereka di kepulauan kita hanyalah dengan menjadikan diri mereka sebagai "satellite", pengikut dan alat dari sesuatu negara besar, baik Amerika Serikat atau Sovjet Rusia. Inilah yang sudah terdjadi selama ini. Kepada Amerika Serikat, pemimpin-pemimpin Djawa berkata: "Tuan-tuan harus membantu kami supaya pengaruh komunis dapat dibendung"; kepada Sovjet Rusia, pemimpin-pemimpin Djawa berkata: "Tuan-tuan harus membantu kami supaya pengaruh Amerika dapat dihanturkan". Pemimpin-pemimpin Djawa telah berusaha untuk mendapat bantuan dari kedua belah pihak, sebagai mereka berhasil melakukannya dimasa yang sudah-sudah. Tetapi jika yang satu pihak menolaknya, maka kaum kolonialis Djawa akan terpaksa menjual diri mereka kepada sesuatu pihak, dan membuat diri mereka sebagai agent dari pihak itu, karena hanya dengan jalan inilah mereka bisa mendapat dan bisa dihidiahkan senjata yang banyak untuk dapat menindas seluruh kepulauan kita. Dalam pada itu kepentingan kita bangsa-bangsa luar Djawa tidaklah mendjadi soal sama sekali bagi mereka itu. Kepentingan kita telah dikorbankan untuk kepentingan orang Djawa memegang kekuasaan tertinggi, untuk kepentingan Amerika membendung pengaruh Sovjet Rusia atau Komunis Tiongkok, atau untuk kepentingan Sovjet Rusia dan Komunis Tiongkok untuk membendung pengaruh Amerika. Sedang kita bangsa-bangsa

Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda, dan lain-lain, telah menjadi korban; kepentingan dan hak nasional kita tidak diindahkan dan hilang lenjap dalam perebutan pengaruh antara orang-orang luar itu diatas persada Tanah Ibu, kampung halaman kita sendiri.

Ringkasnja, hidup-matinja dan tegak-runtuhnja kolonialisme Djawa bergantung pada kesanggupan kaum kolonialis Djawa untuk mengontrol hubungan luar negeri kepulauan kita. Tetapi kontrol yang sematjam ini tidak dapat mengatasi pendidikan dan kemadjuan: sebegitu lekas bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda, dan lain-lain menjadi lebih terdidik, mereka tidak akan dapat dikurung lagi oleh kaum kolonialis Djawa dari berhubungan sendiri dengan seluruh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Bila bangsa-bangsa ini sudah sanggup melakukan hubungan luar negeri mereka sendiri, kolonialisme Djawa, mau tidak mau, akan runtuh. Jadi berachirnja kolonialisme Djawa adalah suatu keharusan sedjarah, suatu akibat dari pada pendidikan dan kemadjuan, suatu hal yang tak dapat dielakkan, dan karena itu suatu hal yang pasti akan datang, dan kapan datangnya hanya soal waktu saja. Yang sudah pasti sekarang ini ialah bahwa generasi baru, Angkatan 65, dari bangsa-bangsa kepulauan kita sudahlah memasuki pintu-gerbang kesadaran dan keinsafan kepada kepentingan nasional mereka masing-masing, kepada barga-diri, kepada kepertajaan pada diri-sendiri, kepada kekuatan dan kekayaan mereka, dan kepada kedudukan mereka di dunia!

* * *

IX

DJALAN KELUAR : MELALUI HAK MENENTUKAN NASIB DIRI-SENDIRI

Bagaimanakah kita dapat mengubah sistem kolonialisme Djawa yang tak dapat kita terima di Tanah Ibu, kampung-halaman kita? Dengan nasihat-nasihat dan budjukan-budjukan? Djarang ada orang atau golongan yang mau melepaskan kekuasaan mereka dengan sukarela. Segala andjuran dan nasihat kepada kaum kolonialis Djawa untuk mengubah sistem pendjadjahan mereka sudah lama terbukti sia-sia belaka. Penulis sendiri termasuk salah seorang yang dalam beberapa waktu yang lampau telah mengusulkan satu kompromi yang adil dengan orang Djawa dalam suatu bentuk pemerintahan federasi. Dalam buku Demokrasi Untuk Indonesia (1958), penulis sudah memberi peringatan kepada golongan kolonialis Djawa, bahwa jika kompromi federasi itu mereka tolak, maka tidak ada djalan lain bagi bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain, "melainkan menindjau kembali kedudukan dan "status" mereka serta apa yang telah terdjadi atas hak luhur dan hak mutlak mereka untuk memerintah diri-sendiri dan untuk menentukan nasib diri-sendiri yang dijamin oleh Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa." Sebenarnja inilah kata-penutup dari Demokrasi Untuk Indonesia.

Tetapi sebagai umum sudah mengetahui segala usaha djudjur itu tidaklah mempunyai kesan apa-apa pada kaum kolonialis Djawa yang memegang tampuk kekuasaan di Djakarta.

Apakah keadaan yang bobrok sekarang ini dapat diubah dengan mengadakan pemberontakan-pemberontakan dengan tiada menjatakan kemerdekaan setjara yang sudah-sudah? Langkah ini sudah diambil selama lebih 10 tahun yang silam dan semuanya telah berakhir dengan kegagalan, ketjuali di Sulawesi, yang meninggalkan kira-kira 200,000 pahlawan-pahlawan yang gugur mulai dari Atjeh sampai ke Maluku. Pemerintah Djawa yang berada di Djakarta tidak dapat lagi ditumbangkan dengan pemberontakan dalam negeri semata-mata, yakni pemberontakan dengan tidak ada pernjataan kemerdekaan, karena apa yang disebut "Republik Indonesia" itu sudah berubah sifat-nja mendjadi satu negara imperialisme Djawa. Dan sesuatu negara imperialisme tidaklah dapat diperangi dengan perang saudara. Kehidupan pemerintah kolonialis Djawa di Djakarta tidak lagi bergantung pada kemauan rakjat di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, dan sebagainya, yang kedudukan mereka sudah diturunkan mendjadi anak negeri tanah djadjaban Djawa. Sebagaimana pemberontakan rakjat di kepulauan kita tidak dapat merobah pemerintah kolonialis Belanda di Den Haag dahulu, demikian juga pemberontakan di Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan lain-lain, tidak dapat lagi menjatuhkan pemerintah kolonialis Djawa di Djakarta sekarang ini. Oleh karena itu idee mengadakan pemberontakan setjara yang sudah-sudah itu haruslah dibuang sama sekali sebagai perbuatan yang sia-sia belaka.

Jang kita maksudkan dengan tjara pemberontakan yang sudah-sudah itu ialah tjara-tjara pemberontakan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita jang gagah berani disegala kepulauan kita terhadap regime kolonialis Djawa tetapi dengan tidak menjatakan diri mereka merdeka dari Djawa. Oleh karena itu mereka sendiri telah membuat pemberontakan mereka itu sebagai satu soal "dalam negeri" semata-mata jang tidak mempunyai hak untuk mendapat perhatian dunia, dan tidak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan Hukum Internasional, dan dengan demikian, memustahilkan sama sekali pengakuan dan bantuan luar negeri terhadap perdjangan mereka itu sendiri. Pada hal pemberontakan mereka terhadap kolonialisme Djawa mempunyai sifat-sifat perdjangan internasional jang tidak kurang dari pemberontakan terhadap kolonialisme Belanda dahulu, atau perdjangan menentang kolonialisme di bagian dunia jang lain, jang berhak mendapat bantuan dan pengakuan dunia internasional. Pemimpin-pemimpin jang baik dari pemberontakan jang sudah-sudah itu mempunyai tjukup keberanian untuk mengubus pedang mereka dari sarungnja, tetapi mereka masih tidak berani menjatakan diri mereka merdeka dari Indonesia-Djawa. Mereka merasa djidjik, dengan alasan-alasan jang sungguh tjukup, terhadap perbuatan regime kolonialisme Djawa, tetapi waktu mereka bertindak, rupnja mereka tidaklah memikirkan sampai ke-achirnja bagaimana mereka dapat mentjapai kemenangan dengan melalui politik samar-samar jang mereka pergunakan itu. Kesadaran bahwa musuh jang mereka hadapi bukanlah lagi pemerintah dari seluruh bangsa-bangsa kepulauan kita, tetapi adalah regime kolonialis Djawa, timbulnja sangat terlambat jaitu sesudah mereka mendekati kekalahan.

Perubahan sifat dari pemerintah Indonesia yang telah menjadi alat yang efektif dari kolonialisme Jawa tidak disadari pada waktunya oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin pemberontakan yang menyebabkan politik dan strategi mereka menjadi kacau-balau, salah-raba dan salah-guna: mereka sebenarnya berperang menentang satu regime kolonialis, tetapi ini dilakukan semata-mata dengan mempergunakan strategi perang saudara; mereka sebenarnya menghadapi peperangan internasional yakni peperangan dengan musuh yang terdiri dari bangsa asing yang datang mendarat dari seberang laut, tetapi ini telah dilakukan dengan mempergunakan politik dan taktik perang dalam negeri. Oleh karena tidak ada ketegasan tentang tujuan, dan tidak ada ketegasan pula tentang tjara-tjara mentjapai tujuan itu, maka akibatnya ialah, didalam negeri, timbul kesamar-samaran umum tentang siapa sebenarnya lawan dan siapa sebenarnya kawan; tidak diketahui siapa yang sebenarnya musuh, dan siapa yang sebenarnya saudara, suatu keadaan yang mengundang musuh kedalam selimut, pengkhianatan dan kegagalan. Sedang di luar negeri dan di dunia internasional, oleh karena tidak ada pernyataan kemerdekaan dan tidak ada tuntutan yang tegas-tegas untuk hak menentukan nasib diri-sendiri, maka pemberontakan mereka itu telah memberi kesan seakan-akan hanya perebutan kursi belaka antara mereka yang tidak mempunyai kedudukan dengan mereka yang duduk dikursi pemerintahan. Kesankesan yang begini diluar negeri tidaklah membantu pemberontakan mereka di dunia internasional. Sedang soal yang sebenarnya, yaitu soal hak menentukan nasib diri-sendiri melawan kolonialisme Jawa tidak pernah dikemukakan dengan tegas-tegas, ketjuali oleh Maluku Selatan, karena pemimpin-pemimpin pemberontakan takut ditjap "pengkhianat" "kepulauan Keling" oleh kaum kolonialis Jawa. Pada hal kalau kita tidak takut ditjap "pengkhianat" oleh kolonialis Belanda, kitapun tidaklah perlu takut ditjap "pengkhianat" oleh kolonialis Jawa! Sudahlah pasti bahwa usaha-usaha perlawanan terhadap sesuatu kolonialisme setjara setengah-hati itu tentu menemui kegagalan.

Dalam pada itu tidaklah boleh dilupakan bahwa dalam dunia modern dewasa ini, dimana penghidupan bangsa-bangsa dan negara-negara sangat bergantung pada satu sama lainnya, sesuatu negara itu dapat berdiri atau tidak, bahkan sesuatu pemberontakan itu berhasil atau gagal, bergantung pada dukungan nasional (dukungan dalam negeri) dan dukungan internasional (dukungan luar negeri). Kedua matjam dukungan ini sama pentingnya, dan jika satu tak dapat ditegakkan dengan tidak ada yang lainnya. Dalam dunia ini sedemikian ini, suatu pemberontakan dalam negeri semata-mata sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk merobah sesuatu negara yang sudah diakui oleh dunia internasional. Lebih-lebih negara-negara tani diseluruh dunia, termasuk Indonesia-Jawa, yang bergantung pada negara-negara industri untuk memperoleh alat-sendjatanja, sangatlah dipengaruhi oleh pergantian keluar negeri itu. Bahkan dibagian dunia kita, bagian dunia yang masih berekonomi tani, terdapat suatu keadaan dimana politik luar negeri memegang peranan yang lebih penting dari politik dalam negeri. Oleh karena itu dalam menjusun suatu rentjana perjuangannya yang efektif untuk melepaskan diri kita dari penindasan regime kolonialis Jawa, kita haruslah menjusun satu strategi yang bisa mendapat dukungan bukan saja didalam tetapi juga

diluar negeri. Suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pemberontakan yang sudah-sudah ialah mereka sudah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mendirikan negara baru, didalam negeri, tetapi mereka sama sekali tidak mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melegalkan tindakan mereka di luar negeri setjara yang dapat di mengerti dan dapat didukung oleh dunia internasional. Pemberontakan dan pendirian negara baru hanya dapat dibenarkan dan disokong oleh dunia internasional kalau hal itu berdasarkan atas hak menentukan nasib diri-sendiri yang dinjatakan dengan proklamasi kemerdekaan. Tetapi sesudah bertahun-tahun berontak dan berperang melawan regime kolonialis Djawa, tak ada pemimpin perlawanan yang dengan tegas-tegas menuntut hak menentukan nasib sendiri dan menjatakan kemerdekaan dari Djawa, jaitu langkah-langkah yang sebenarnya dapat melegal-kan pemberontakan mereka dalam Hukum Internasional dan di dunia internasional.

Oleh karena itu suatu djalan baru menudju kepada kemerdekaan yang sedjati, yang mempergunakan tjara-tjara nasional dan internasional, haruslah ditjari untuk bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda, dan lain sebagainya : djalan baru ini tidak dapat lain melainkan djalan hak menentukan nasib diri-sendiri yang menudju kepada kemerdekaan yang sedjati! Hak menentukan nasib diri-sendiri adalah kuntji kepada masa depan politik bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda, dan lain-lain di kepulauan kita. Kalau kita tidak menuntut dan mempertahankan hak luhur kita ini, maka kita tidak mempunyai lagi masa depan politik, kita tidak mempunyai lagi masa depan ekonomi, kita tidak mempunyai lagi masa depan sosial, dan kita tidak mempunyai lagi masa depan untuk pembangunan dan kemadjuan. Djalan Indonesia-Djawa adalah djalan yang langsung menudju perbudakan, kemunduran, kebodohan, dan kemungkinan kehantjuran sebagaimana telah dibuktikan oleh 20 tahun pendjadjahan kolonialis Djawa selama ini. Sumatera hanya dapat dibangunkan oleh bangsa Sumatera, Sulawesi oleh bangsa Sulawesi, Maluku oleh bangsa Maluku, Kalimantan oleh bangsa Kalimantan, Bali oleh bangsa Bali, Sunda oleh bangsa Sunda, dan demikianlah seterusnya. Kita tidak memerlukan kaum kolonialis Djawa untuk mengadjar kita bagaimana memerintah Tanah Ibu, kampung halaman, tanah pusaka dari nenek-mojang kita! Duapuluh tahun dibawah pendjadjahan mereka yang morat-marit itu sudah tjukup inemberikan bukti kepada kita dan kepada seluruh dunia bahwa kaum kolonialis Djawa tidaklah mempunyai kesanggupan dan ketjakinan untuk mendjadi pemimpin bagian dunia kita ini. Sebegitu djauh kesombongan dan kedjahatan mereka sudah dapat dilakukan oleh karena adanya sendjata-sendjata buatan dan hadiah orang asing. Sebegitu djauh kita sudah menentang kedjahatan mereka hanya didalam negeri -- dengan pemberontakan yang berlumuran darah kaum-kerabat, kawan seperjuangan kita -- tetapi sebegitu djauh kita belum lagi menentang kolonialisme Djawa itu didunia internasional dimana sebenarnya terdapat akar yang sesungguhnya dari kolonialisme Djawa itu -- dari mana sendjata didatangkan.

Hak menentukan nasib diri-sendiri dari segala bangsa telah mendjadi dasar ketertiban dunia sedjak Perang Dunia ke-I, dan sudah lebih dikuatkan lagi sesudah Perang Dunia ke-II dengan ditjantungkannya dalam P i a g a m

Perserikatan Bangsa-bangsa. Hak ini telah dihormati oleh hampir semua bekas negara-negara imperialis, dengan mengembalikan hak menentukan nasib diri-sendiri kepada bangsa-bangsa yang pernah didjadjah mereka. Segala negara baru didunia yang berdiri sedjak selama setengah abad ini, telah memperoleh hak hidup mereka, setjara langsung atau tidak, dari pada hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib diri-sendiri. Pengakuan sedja - gat terhadap hak ini menandakan kemadjuan dan ketinggian peradaban manusia dalam menudju pendjundjungan kebenaran dan keadilan. Ini adalah satu pertanda pula dari peradaban ummat manusia dalam lapangan hubungan antara bangsa pada pertengahan abad ke 20 ini.

Walaupun demikian hak menentukan nasib diri-sendiri dari bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali dan Sunda belumlah dikembalikan kepada mereka masing-masing sampai sekarang. Saat untuk mengembalikan kedaulatan atas setiap negeri di kepulauan kita kepada bangsa asli yang berhak, kini sudah tiba. Pendjadjahan sudah diketjam disegala pelosok dunia yang lain; pendjadjahan tidak bisa dan tidak dapat dipelihara di kepulauan kita. Pendjadjahan Djawa telah dimungkinkan dengan tipu-muslihat yang achirnja menimbulkan toleransi bangsa-bangsa ber-industri dari luar Asia Tenggara ini. Dalam dunia kita yang saling berhubungan rapat ini, tak ada sesuatu ketertiban, baik ketertiban pendjadjahan atau yang lainnja, lebih-lebih dibagian dunia tani, dapat dipertabankan atau dipelihara dengan tidak ada perisetudjuan, setjara terang-terangan atau setjara diam-diam, dari bagian dunia yang lainnja. Karena itu kita bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda, Irian Barat dan lain sebagainya haruslah menjatakan kepada seluruh masjarakat manusia di dunia, kepada setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa tentang kehendak kita untuk menentukan nasib diri-sendiri dan memegang kedaulatan kita sendiri, suatu hak yang sudah dimiliki oleh semua bangsa-bangsa yang beradab didunia, ketjuali kita. Dunia tidak dapat menentang kolonialisme Barat di Afrika dan dibagian Asia yang lain, sedang pada saat itu djuga melindungi dan membiarkan kolonialisme Djawa di Asia Tenggara.

* * *

X

PENDIRIAN REPUBLIK-REPUBLIK SUMATERA, SULAWESI, MALUKU, KALIMANTAN, SUNDA, BALI, IRIAN, DJAWA DAN KONFEDERASI ASIA TENGGARA (KASIA T)

Pendirian Republik Sumatera (luas daerah: 182,859 mil persegi), Republik Sulawesi (luas daerah: 72,986 mil persegi), Republik Kalimantan (luas daerah: 200,800 mil persegi), Republik Maluku (luas daerah: 28,766 mil persegi), Republik Irian (luas daerah: 160,618 mil persegi), Republik Bali (luas daerah: 2,095 mil persegi), Republik Sunda (luas daerah: 17,200 mil persegi), akan mengembalikan hak menentukan nasib diri-sendiri dibagian dunia kita ini kepada pemilik-pemiliknja yang sah dan yang berhak atasnja

Kita tidak perlu meminta maaf atau memberi alasan-alasan yang lebar-pandang untuk membenarkan pembangunan negara-negara ini kembali, karena masing-masing putera bangsa ini mempunyai hak sejarah dan hak hukum, baik berdasarkan hukum nasional, maupun berdasarkan hukum internasional, untuk mengurus dan memerintah diri mereka sendiri.

Republik Sumatera, dengan penduduk kira-kira 20 juta, bukanlah hanya satu negara kecil, tetapi akan merupakan satu negara menengah, yang menurut penduduknya setingkat dengan Thailand, Burma, Iran, Yugoslavia, Canada, Ethiopia, Rumania dan Argentina. Diantara 111 (seratus-sebelas) negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dewasa ini, 93 (sembilan puluh-tiga!) diantaranya lebih kecil dari Sumatera.

Republik Sulawesi, dengan penduduknya yang 9 juta itu sama tingkatnya menurut jumlah penduduk dengan Australia, Austria, Belgium, Ceylon, Cuba, Yunani, Hongaria, Nepal, Portugis, Sweden, dan Saudi-Arabia. Diantara negara-negara yang menjadi anggota PBB sekarang ini, 58 (lima-puluh delapan!) diantaranya lebih kecil dari Republik Sulawesi.

Republik Kalimantan, dengan penduduk 5 juta, sama tingkatnya menurut jumlah penduduk dengan Kamboja, Denmark, Ecuador, Finland, Ghana, Madagaskar dan Yaman. Diantara negara-negara anggota PBB, 45 diantaranya lebih kecil dari Republik Kalimantan.

Republik Maluku dan Republik Bali, dengan penduduk masing-masing 2 juta, sama besarnya dengan Albania, Costa Rica, Dahomey, Honduras, Israel, Jordan, Laos, Libanon, New Zealand, Paraguay, dan Somalia. Walaupun demikian masih ada lagi 19 buah negara anggota PBB yang lebih kecil dari Republik Maluku dan Republik Bali.

Republik Irian, dengan penduduk 750,000 jiwa sama besarnya dengan Congo (Brazzaville), Cyprus, Gabon, Islandia, dan Luxembourg yang kesemuanya adalah negara-negara anggota PBB. Sedang luas wilayah Irian sama sekali tak dapat diperbandingkan dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dari negara-negara itu.

Republik Sunda, dengan penduduk 25 juta, berhak mendapat kedudukan yang sama dengan Filipina, Turki dan Mesir. Sedang lebih 100 buah negara-negara anggota PBB lebih kecil dari Republik Sunda menurut jumlah penduduknya.

Dalam bagian dunia antara pulau Inggris dan Iran terdapat lebih 25 buah negara-negara berdaulat: siapapun tak dapat bertengkar bahwa 8 buah negara -- kita hitung satu negara Jawa, karena kita tidak menolak hak memerintah diri sendiri bagi orang Jawa, walaupun mereka itu menolaknya untuk kita, -- dalam satu daerah yang sama luasnya adalah terlalu banyak untuk Asia Tenggara, karena jarak antara Sumatera dan Irian Barat adalah sama sebagai antara Inggris dan Iran. Demikian juga kalau didunia sekarang terdapat 24 buah negara-negara Amerika, 25 buah negara-negara Eropa, 24 buah negara-negara Negro Afrika, 4 buah negara-negara Indotjina, dan 15 buah negara-negara Arab, siapakah mengatakan bahwa kita tidak boleh mempunyai 8 buah negara merdeka di Dunia Melaju, satu bagian dunia yang tjukup luas dan mempunyai penduduk tjukup banyak dibandingkan dengan bagian-bagian dunia yang lain itu? Djanganlah kita sampai terpedaya oleh

propaganda kaum kolonialis Djawa yang mentjoba-tjoba mengabui mata kita seakan-akan pintu idjtihad kearah keselamatan Tanah Ibu kita masing-masing sudah tertutup dibagian dunia kita untuk selama-lamanja. Pintu idjtihad kearah keselamatan Tanah Ibu dan kemerdekaan jang sedjati bagi kita semua masih terbuka selebar-lebarnja, dan kuntjinja ada pada tangan kita masing-masing. Marilah kita mempergunakan kuntji ini untuk membuka pintu gerbang baru jang dapat membawa kita dan bangsa-bangsa kita semua kepada "baldatun thajibatun wa Rabbun Ghafur", -- negara jang makmur dan Tuhan Jang Pengasih dan Pengampun.

Pengembalian kedaulatan atas Sumatera kepada bangsa Sumatera, atas Sulawesi kepada bangsa Sulawesi, atas Maluku kepada bangsa Maluku, atas Irian kepada bangsa Irian, atas Bali kepada bangsa Bali, atas Pasundan kepada bangsa Sunda, dan atas daerah bangsa Djawa kepada bangsa Djawa, adalah semata-mata suatu tindakan keadilan jang sudah lama sekali tidak dilakukan! Inilah satu-satunya djalan untuk mengembalikan keamanan, ketenteraman, dan ketenangan kepada bagian dunia jang amat luas ini jang hingga kini terlibat dalam kantjah kekatjauan, penindasan, perampasan, ketiadaan hukum dan ketidak-adilan, disebabkan oleh pemberontakan jang tiada berhenti-hentinja terhadap kolonialisme Djawa disatu pihak, dan dilain pihak oleh penindasan-penindasan kedjam terhadap bangsa-bangsa jang berontak itu oleh kaum pendjadjah Djawa. Dengan tindakan keadilan ini maka sumber kekatjauan dan perselisihan jang terbesar, jaitu satu bangsa dari satu pulau mentjoba-tjoba memperbudakkan bangsa-bangsa dari pulau-pulau jang lain, akan tak dapat dilakukan lagi.

Sebaik keamanan dan perdamaian sudah dapat dikembalikan, maka djalan menudju pembangunan dan kemandjuaan akan terbuka dengan selebar-lebarnja, jang mana sudah ditutup selama 20 tahun ini oleh kolonialisme Djawa dan akibat-akibatnja. Pembangunan akan dapat dilakukan karena masing-masing bangsa itu sudah memiliki apa jang mendjadi hak mereka. Mereka akan mendjadi Tuan dirumah mereka masing-masing. Masalah tata-usaha atau administrasi masing-masing negara akan dapat dikendalikan dan dipimpin dengan rapi karena luas daerahnja sudah dibatasi dalam ukuran jang sedang dan dalam wilajah jang sesungguhnya. Dengan demikian rentjana-rentjana ekonomi akan dapat didjalankan dialam kenjataan.

Atas dasar sama-sama berdaulat dan sederadjat ini maka suatu susunan kerdjasama jang baru antara negara-negara jang benar-benar merdeka ini akan dapat kita bangunkan di kepulauan kita dalam bentuk satu Konfederasi Asia Tenggara (KASIAT) jang terdiri dari Republik Sumatera, Republik Sulawesi, Republik Maluku, Republik Kalimantan, Republik Irian, Republik Bali, Republik Sunda, dan Republik Djawa, sebagai anggota jang sederadjat dalam memadjukan kepentingan kita bersama, dengan keadilan untuk semua dan dengan tidak ada kerugian untuk pihak manapun. Dalam lingkungan Konfederasi Asia Tenggara jang besar dan adil ini, kita bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Irian, Bali, Sunda, Kalimantan dan Djawa akan dapat bekerdjasama atas dasar keadilan dan persamaan dalam usaha membangun dunia baru untuk kita sendiri dan anak-turunan kita, dalam suasana bantu-membantu jang diberikan dengan keichlasan dan bukan dalam suasana

penindasan, kediktatoran, dan pendjadjahan sebagai jang terdjadi d a l a m republik Indonesia-Djawa sekarang ini.

Oleh karena masing-masing kita sudah mendapat kesempatan untuk mengurus dan membereskan rumah-tangga kita masing-masing lebih dahulu maka kita akan dapat menolong satu sama lain setjara lebih baik dan lebih berarti. Bahkan soal kepadatan penduduk dipulau Djawa akan dapat kita atasi setjara lebih bidjaksana dengan usaha bersama semua negara-negara anggota Konfederasi Asia Tenggara, dengan rentjana pemindahan penduduk jang bertanggung djawab, ke wilajah-wilajah anggota Konfederasi jang ekonominja dapat menampung penduduk-penduduk baru itu. Dengan demikian kita akan dapat memindahkan persoalan kepadatan penduduk di pulau Djawa itu dari gelanggang politik -- dimana persoalan ini sekarang dipakai orang sebagai alat politik untuk mentjapai sesuatu maksud jang lain dan bukan untuk menolong golongan orang jang melarat itu sendiri, -- kelapangan kemanusiaan, kemasjarakatan dan perekonomian dimana terletak tempat jang sebenarnja dari persoalan ini, untuk kebaikan kita semua, baik bagi mereka jang benar-benar menghadjati tempat baru, maupun bagi mereka jang menerimanja.

* * *

XI

KONFEDERASI ASIA TENGGARA DAN PERDAMAIAN DUNIA MELAJU

Dipandang dari sudut politik internasional, dan politik nasional, pendirian satu Konfederasi Asia Tenggara, jang anggotanja terdiri dari Republik Sumatera, Republik Sulawesi, Republik Maluku, Republik Kalimantan, Republik Bali, Republik Irian, Republik Sunda dan Republik Djawa, akan membawa perdamaian dan ketenteraman politik kembali kepada bagian dunia kita ini, karena dengan demikian segala akar-akar perselisihan sudah dibongkar sampai ke udjung-udjungnja dan ditiadakan. Dengan pendirian negara-negara ini maka suatu sistem keseimbangan kekuasaan (balance of power) jang dapat bekerja dan berdjalan sendiri sudah ditimbulkan dibagian dunia kita ini. Sedjak dunia berkembang keseimbangan kekuasaan itu adalah mendjadi d asar perdamaian dibagian dunia jang manapun djuga. Pada waktu ini dalam Dunia Melaju kita tidak ada lagi keseimbangan kekuasaan itu, karena itu perdamaian tak akan dapat dikembalikan di Asia Tenggara sampai keseimbangan kekuasaan itu dapat dibangunkan kembali. Dalam sedjarah, aggressi atau penyerangan itu selamanja merupakan suatu akibat jang tak dapat dielakkan dari ketiadaan keseimbangan kekuasaan antara dua negara jang berdekatan. Malaysia sudah didjadikan sasaran jang kedua dari aggressi Indonesia-Djawa sesudah Irian Barat, karena Malaysia berada sangat dekat dan mudah didjadikan mangsa. Sesudah Malaysia, kalau imperialisme Djawa berhasil, maka akan datang pula giliran Filipina, Australia, New Zealand, dan negara-negara lain jang ketjil disekitar bagian dunia kita ini. Oleh karena tak ada satu

negarapun dibagian dunia kita ini jang lebih besar dari Indonesia-Djawa, semua negara-negara jang berdekatan haruslah mentjari perlindungan bagi keselamatan mereka dengan mengadakan persekutuan dengan negara-negara jang lebih besar dari luar bagian dunia kita ini. Ini telah merupakan satu keharusan strategi bagi semua negara-negara tetangga Indonesia-Djawa. Dalam lingkungan Asia Tenggara sendiri dewasa ini tidak ada lagi satu negara jang dengan sendirinja dapat menahan agresi Indonesia-Djawa, karena itu bagian dunia kita ini sudah menjadi satu bagian dunia jang paling gontjang, dimana perdamaian hanya bisa dipertahankan dengan tjampur-tangan atau intervensi sesuatu kekuasaan dari luar daerah ini.

Dengan berdirinja Republik Sumatera, Republik Sulawesi, Republik Maluku, Republik Kalimantan, Republik Irian, Republik Bali, Republik Sunda dan Republik Djawa, maka pertama sekali, ketenteraman politik akan dapat dikembalikan kebagian dunia ini sebagaimana dizaman sebelum pendjadjahan Belanda, karena dalam susunan jang adil ini perbedaan kekuatan antara negara-negara dibagian dunia kita ini sudah dikurangi. Tak ada lagi negara jang terlalu besar dan tak ada pula jang terlalu ketjil. Persatuan semua mereka dalam satu Konfederasi Asia Tenggara akan dapat mempertahankan bagian dunia kita dari serangan dari luar atau serangan dari dalam, karena kalau salah satu diantara mereka ingin menjadi sipenjerang seperti Djawa dewasa ini, maka akan dapat ditundukkan dengan mudah. Djawa akan berhenti menjadi negara aggressor, negara penjerang, karena ia takkan dapat lagi bertindak dengan tidak bertanggung djawab sebagai sekarang, karena Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, dan lain-lain, tak dapat diperas lagi untuk membangunkan kekuatan militer jang tidak bertanggung djawab sebagai sekarang. Lagi pula dalam bentuknja jang sekarang, walaupun Indonesia-Djawa itu mempunyai daya menjerang dan daya merusak, tetapi sebenarnya ia tidak akan dapat dipertahankan dari serangan dari luar, karena ia selalu terlibat dengan permusuhan "dalam negeri". Kebenaran ini rupanja telah luput dari mata orang-orang jang ingin melihat Indonesia-Djawa sebagai imbalan Komunis Tiongkok dibagian dunia kita ini. Dalam pada itu agresi dari Indonesia-Djawa tidak dapat dihentikan lagi dengan tak ada tjampur-tangan atau intervensi sesuatu kekuasaan besar dari luar bagian dunia kita ini. Karena itu Indonesia-Djawa telah menjadi penjakit kanker politik di Asia Tenggara jang membahayakan keselamatan nasional dan ketertiban internasional dibagian dunia kita ini.

Kedua, pendirian kembali negara-negara ini akan menambah ketenteraman politik dibagian dunia ini karena dengan demikian djumlah negara-negara jang akan ikut serta dalam sistem keseimbangan kekuasaan disini akan bertambah. Makin banyak negara jang ikut serta maka sistem keseimbangan kekuasaan itu semakin kuat.

Ketiga, republik-republik ini, karena letaknja jang sangat baik, jang satu terpisah dari jang lainnja dengan suatu djarak jang sedang, dan kebanyakannja dipisah oleh perairan internasional dan lautan lepas, semua ini akan membantu pula menenteramkan bagian dunia kita ini, karena letak negara-negara jang sangat berdekatan dengan satu sama lainnja memang merupakan salah satu sebab pula dari mudah timbulnja peperangan, sebagaimana terbukti dalam sedjarah.

Ke-empat, manakala kedelapan republik ini mengambil tempat jang mendjadi hak mereka di forum internasional sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan badan-badan internasional jang lain-lain, hal ini akan menambah pengaruh, peranan dan kehormatan kita bangsa-bangsa Melaju di d u n i a internasional; hal ini akan membawa kita kepada kedudukan diplomatik baru jang amat penting, dan akan lebih memudahkan bagi kita untuk mempertahankan kepentingan kita bersama, baik dibagian dunia kita ini, maupun diforum internasional, karena suara jang baru kita peroleh kembali dalam lapangan politik internasional ini akan mendjadi harapan dan tjarian orang, dan keputusan-keputusan kita bersama sebagai anggota Konfederasi Asia Tenggara, akan mempunyai nilai jang besar dalam pertjaturan politik dunia.

Hal ini djauh sekali bedanja dari keadaan kita sekarang jang sama sekali tidak mempunyai kedudukan internasional, bahkan kita bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda, Irian, dan lain-lain, seakan-akan tidak ada didunia. Kedudukan-kedudukan jang mendjadi hak kita di madjlis-madjlis internasional telah diserobot oleh delegasi kaum kolonialis Djawa jang kerdjanja hanja membeo kepada sesuatu negara besar jang mau menghadiahkan sendjaja kepada mereka. Dengan susunan baru, kita akan dapat merebut kembali kedudukan dan status jang mendjadi hak kita di d u n i a, dan kita akan mendapat 7 buah suara baru di Perserikatan Bangsa-bangsa, dimana kita sekarang katanja "diwakili" oleh Indonesia-Djawa jang hanja mempunyai satu suara, dan suara jang satu ini sebenarnya dipergunakan untuk meniadakan dan bukan untuk mempertahankan hak kita.

Dan achirnja, untuk kemakmuran dan perdamaian bagian dunia kita ini, Konfederasi Asia Tenggara dapat diperluas meliputi Pilipina, Malaysia, Thailand, Australia, New Zealand, Vietnam dan Kamboja, djika negara-negara ini bersedia menjertainja sebagai anggota jang sederadjat dan sama-sama berdaulat dengan kita dari Sumatera, Sulawesi, Maluku, Irian, Kalimantan, Bali, Sunda dan Djawa.

* * *

XII

KESIMPULAN : PANGGILAN KEHORMATAN

Walaupun kita tidak dapat lagi menguasai masa-silam kita, tetapi kita masih dapat menguasai masa-depan kita. Ahli-ahli sedjarah memandang bahwa masa-depan itu adalah perkembangan dan kelanjutan dari masa-silam, tetapi dalam perkembangan dan kelanjutan ini termasuk djuga anasir-anasir keinginan, kemauan, hasrat, tekad dan rentjana kita sekarang. Masa-depan kita untuk sebagian besarnya bergantung pada apa jang kita lakukan pada masa sekarang. Kita dapat mengubah keadaan dan kehidupan bangsa-bangsa kita jang morat-marit sekarang ini; kita dapat melamparkan belenggu-belenggu pendjadjahan Djawa; kita dapat mentjapai hak menentukan nasib diri-sendiri; d j i k a kita sadar pada kepentingan

nasional bangsa kita sendiri, d j i k a kita sadar pada sedjarah kita, dan pada tradisi kita. Tetapi suatu bangsa yang sudah hilang ingatanannya, yang sudah melupakan sedjarahnja, yang sudah meninggalkan tradisinja, yang tidak memahami kepentingan kebangsaannya sendiri, bangsa-bangsa yang sematjam ini tidak akan memperoleh hak menentukan nasib diri-sendiri lagi, mereka sudah masak untuk didjadjah dan diperbudakkan. Bangsa-bangsa yang sematjam ini sudah seperti kapal tidak berkemudi, seperti orang tidak beringatan, seperti organisasi tak bertudjuan, -- semua ini tidak lagi berdjalan menudju sesuatu tudjuan yang tertentu dan pasti, tetapi hanya hanjut dengan tak tentu arah-tudjuan lagi. Dan mereka yang hanjut sudah kehilangan kontrolle dan kendali mereka atas masa-depannja sebagaimana sudah hilang kontrolle dan kendali mereka atas masa-silamnja.

Saat sedjarah untuk menjatakan kemerdekaan Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Bali, Sunda dan Irian Barat kini sudah sampai ditengah-tengah kita! Saat sedjarah ini sudah tiba ditengah-tengah kita setelah melalui perkembangan-perkembangan sedjarah yang tak dapat dielakkan, yang sudah bekerdja selama 20 tahun ini, dalam waktu mana imperialisme Djawa sudah berkembang dari baji mendjadi dewasa. Imperialisme Djawa itu sekarang sudah memasuki lagi dalam satu taraf sedjarah yang tidak dapat dielakkan, dimana ia telah memasuki lapangan pertarungan bersendjata didalam dan diluar negeri, tegasnja melibatkan dirinja sendiri dalam peperangan dalam dan luar negeri pada satu saat yang sama. Didalam negeri dengan kita di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Irian dan Fasundan; diluar negeri dengan negara-negara disekitar kita: Malaysia, Australia, New Zealand dan Ingeris. Sebagaimana halnya semua negara didunia ini adalah dikelilingi oleh negara-negara lain, -- Indonesia-Djawa tak terketjuali, -- maka adakalanya tiba suatu saat dalam sedjarah dimana keadaan perhubungan antara negara-negara itu mendjadi sedemikian rupa sehingga memungkinkan sesuatu perobahan yang radikal. Kita sekarang sedang berhadap-hadapan muka dengan saat sedjarah ini. Kita harus mempergunakan saat sedjarah ini untuk menjatakan kemerdekaan kita dari kolonialisme Djawa dan mengambil kembali segala hak pusaka kepunjaan kita!

Perdjuaan untuk mentjapai kemerdekaan dan hak menentukan nasib diri sendiri tidak pernah suatu perdjuaan yang sia-sia. Bangsa-bangsa Sumatera, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Irian Barat, Bali, Sunda, dan lain-lain, marilah kita bersatu, marilah kita dirikan satu persekutuan sutji untuk melawan penindas kita bersama, jaitu kaum kolonialis Djawa! Djanganlah kita sampai membiarkan saat sedjarah ini terlepas dari tangan kita, karena djika kita kehilangan kesempatan ini, maka ini mungkin berarti kehilangan kesempatan untuk selama-lamanja. Kita harus bersjukur kepada Tuhan, karena saat sedjarah yang hilang bagi kita ditahun 1945 -- karena kekurangan pengertian politik, -- kini sudah kembali sekali lagi untuk kedua-kalinja dalam masa hidup kita, suatu hal yang sungguh djarang terdjadi dalam sedjarah dunia. Kita harus bangun merebut saat dan kesempatan ini, karena apa yang kita lakukan, disini dan sekarang, akan menentukan nasib Tanah Ibu, kampung-halaman kita,

Ke-e

djadi

untuk masa jang akan datang jang berabad-abad lamanya. Marilah kita mempergunakan kesempatan saat sedjarah ini untuk membela kehormatan kita, dan untuk memelihara masa-depan anak-keturunan kita, dengan menederdekan Tanah Ibu kita masing-masing dari penindasan kolonialisme Djawa!

Hasan Muhammad di Tiro

New York, 3 Desember, 1964

* * *
* *
*

untuk me
mem
te

Penerbit:
SUMATERA BERDAULAT
Medan
1965